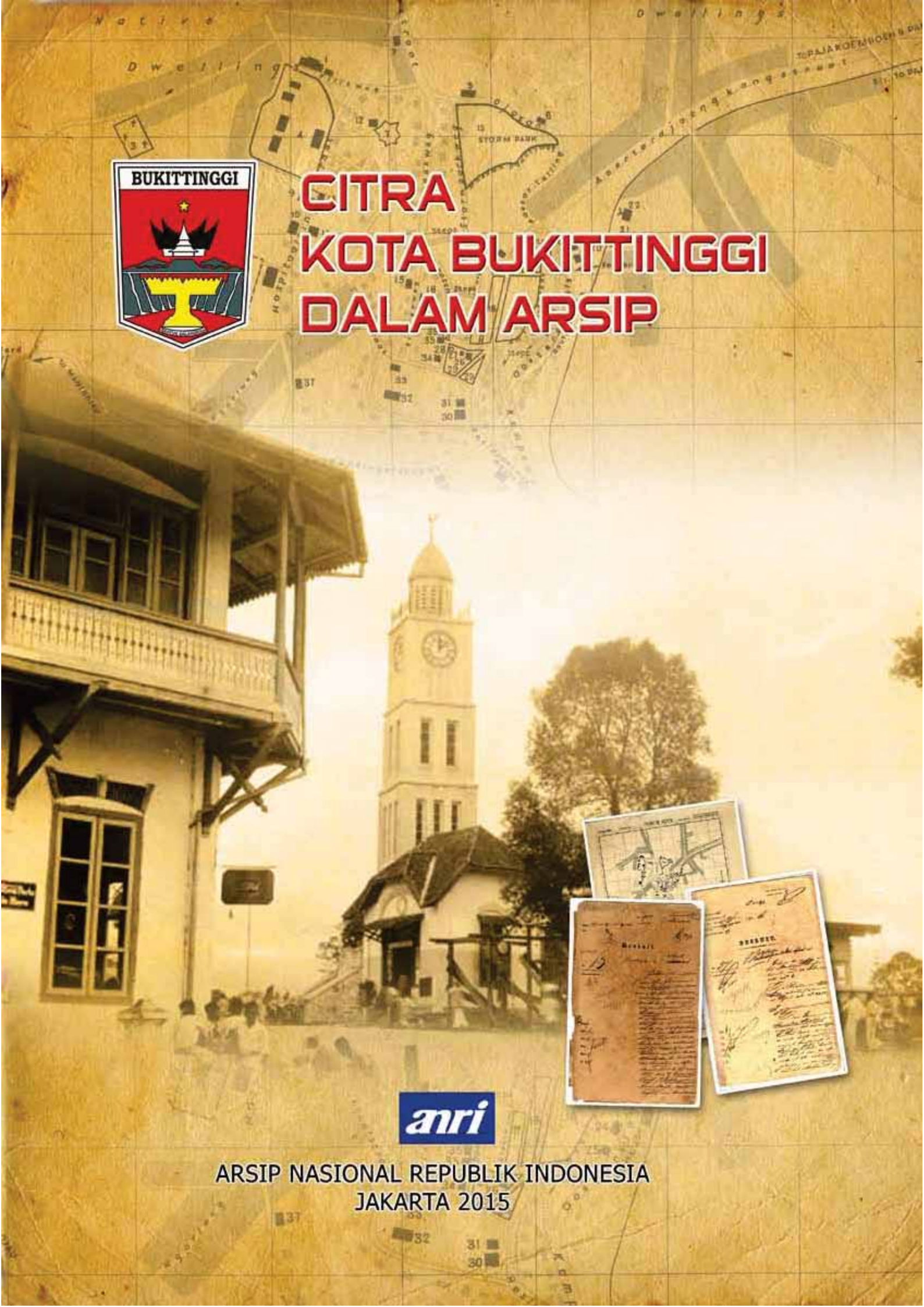

CITRA KOTA BUKITTINGGI DALAM ARSIP

anri

ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
JAKARTA 2015

CITRA KOTA BUKITTINGGI DALAM ARSIP

anri

Arsip Nasional Republik Indonesia
Jl. Ampera Raya No. 7, Cilandak Timur, Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12560
Telp. 62-21-7805851, Fax.62-21-7810280, 7805812
http//www.anri.go.id, e-mail: info@anri.go.id

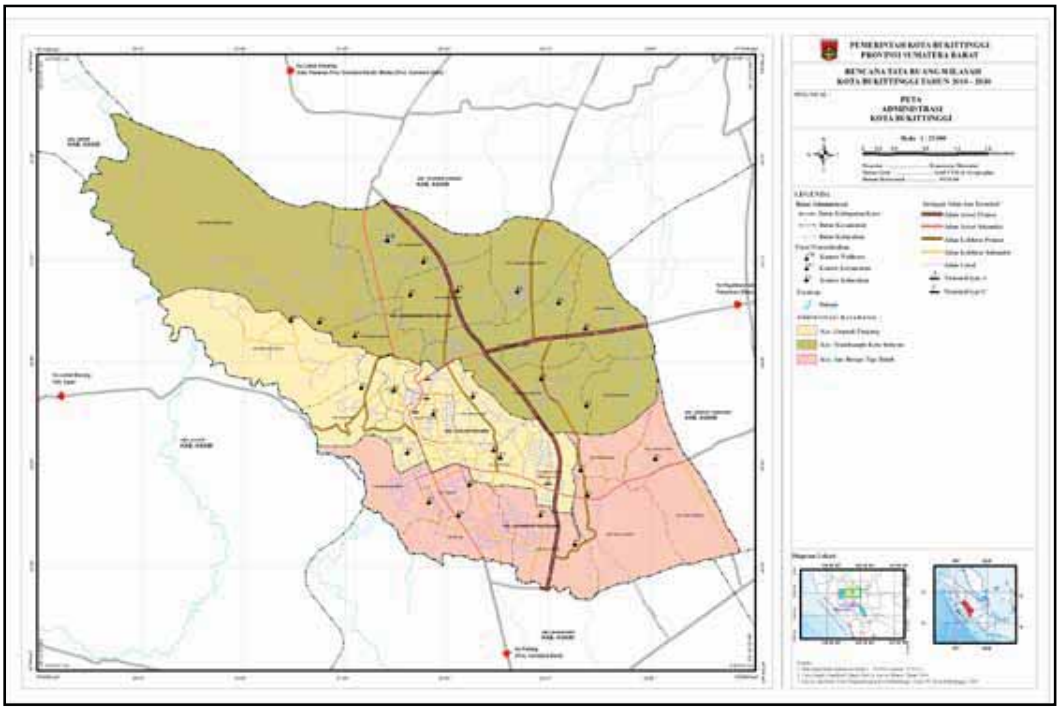

Peta Wilayah Kota Bukittinggi

Sumber : Kementerian Pekerjaan Umum

Lambang Pemerintah Kota Bukittinggi

Abdul Gafar
Pj. Walikota Bukittingi
Periode 2015

dr. Harma Zaldi, Sp.B FinaCS
Wakil Walikota Bukittinggi
Periode 2010-2015

Yuen Karnova, SE
Sekretaris Daerah Kota Bukittingi
Periode 2010-2015

Beny Yusrizal, S.IP
Ketua DPRD Kota Bukittinggi
Periode 2014 - 2019

WALIKOTA BUKITTINGGI
DARI MASA KE MASA

Bermawi ST. Rajo Ameh
(1945)

Djamin Datuk Bagindo
(1945-1947)

Saadoe'ddin Djambek
(1950-1952)

Nauman Dj. Dt. Mangkuto.A
(1952-1957)

Dr. Abdoel Rivai
(1952-1957)

Baharuddin Kamil
(1959-1960)

Anwar Maksum
(1960-1966)

Prof. M. Asril, SH
(1966-1968)

H.A Kamal, SH
(1968-1976)

WALIKOTA BUKITTINGGI
DARI MASA KE MASA

Drs. Masri
(1976-1978)

Dr. Oemar Gafar
(1978-1983)

Drs. B. Burhanuddin
(1983-1988)

Drs. H. Hasan Basri
(1988-1989)
(6 Bulan)

H. Armedi Agus
(1989-1999)

Drs. H. Rusdi Lubis
(1999-2000)

Drs. H. Djufri
(2000-2009)

Drs. H. OS. Yerli Asir
(2005)
(6 Bulan 23 Hari)

Ismet Amzis, SH
(2010-2015)

SAMBUTAN
KEPALA ARSIP NASIONAL RI

SAMBUTAN
KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

Indonesia terdiri atas beribu-ribu pulau, berbagai suku bangsa, beragam agama dan budaya. Keunikan Indonesia terletak pada keanekaragaman tersebut. Keanekaragaman yang disandang Indonesia menjadi indah bagaikan warna-warni pelangi. Keanekaragaman Indonesia tersebut kemudian mengkristal dalam semboyan **Bhinneka Tunggal Ika.**

Keanekaragaman dan warna-warni indah Indonesia tergambar secara beruntun dalam perjalanan sejarahnya yang penuh dinamika. Perjalanan sejarah Indonesia tersebut terekam dalam arsip, baik dalam arsip konvensional maupun dalam arsip media baru. Arsip menjadi deposit sejarah yang terus bertumbuh secara akurat. Sehingga tidaklah berlebihan apabila dikatakan bahwa: "Dari semua asset yang ada, arsip adalah asset negara yang paling berharga" (Sir Arthur Doughty, 1924). Wilayah boleh membelah diri, daerah boleh mengurus diri sendiri-sendiri, tetapi arsip tetap sebagai jati diri. Arsip merupakan warisan nasional. Oleh karenanya arsip perlu diselamatkan, dipelihara, dan dilestarikan. Keberadaban suatu bangsa dapat dilihat dari seberapa utuh dan lengkap arsipnya (Sir Arthur Doughty, 1924).

Khazanah kearsipan mengenai Kota Bukittinggi banyak tersimpan di Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI), baik menyangkut adat istiadat, kebudayaan, kehidupan politik, kunjungan kenegaraan, baik dalam negeri maupun luar negeri, dan arsip yang merefleksikan keindahan seni dan budaya Kota Bukittinggi. Dalam rangka penguatan otonomi daerah, arsip tersebut diinformasikan kembali kepada masyarakat Kota Bukittinggi melalui program ANRI yang disebut dengan Citra Daerah. Program Citra Daerah pada dasarnya merupakan upaya mengungkapkan kembali memori kolektif daerah yang terekam dalam Citra Kota Bukittinggi Dalam Arsip.

Program Citra Daerah bertujuan meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap nilai-nilai budaya yang berkembang di lingkungannya, memupuk kebanggaan dan rasa cinta terhadap Tanah

Air, menghargai keberagaman, membangun solidaritas, memupuk rasa persatuan dan memperkokoh kesatuan bangsa, sekaligus mendukung pelaksanaan **Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014** tentang Pemerintahan Daerah.

Citra Daerah ini diterbitkan dengan dukungan data yang terkandung dalam arsip. Citra Daerah merefleksikan bagaimana suatu daerah ikut berperan, memberi warna dan corak dalam sejarah perjalanan bangsa dari masa ke masa. Khazanah arsip tersebut memberikan informasi yang akurat dan obyektif mengenai perjalanan sebuah daerah dalam membangun kehidupan berbangsa dan bernegara dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), yang terekam dalam arsip baik dalam bentuk teks, peta, maupun foto mengenai sebuah daerah. Citra Daerah merupakan rumusan dari kearifan lokal yang dimiliki sebuah daerah.

Citra Daerah merupakan satu kesatuan informasi yang menggambarkan dinamika kolektif sebuah daerah. Sebuah dinamika kolektif yang terbentuk di atas kesadaran sejarah yang dialami bersama. Kesadaran sejarah ini diharapkan dapat menjadi landasan moral yang kokoh untuk pijakan melompat ke masa depan yang lebih baik. Kesadaran sejarah ini merupakan modal dasar yang kokoh dalam memperkuat pengembangan Otonomi Daerah. Daerah yang kuat dan berkarakter menjadi prasyarat tegaknya NKRI. Citra Daerah Kota Bukittinggi jauh dari sempurna. Keterbatasan halaman menjadikan Citra Daerah hanya memuat sebagian kecil dari data kearsipan mengenai Kota Bukittinggi yang tersimpan di ANRI. Namun demikian kehadiran Citra Daerah ini diharapkan dapat mendorong berkembangnya program lanjutan dari Pemerintah Daerah Kota Bukittinggi khususnya di bidang kearsipan.

Jakarta, Desember 2015

Kepala,

Dr. Mustari Irawan

DAFTAR ISI

Peta Wilayah Kota Bukittinggi ____ i
Lambang Pemerintah Kota Bukittinggi ____ ii
Walikota Bukittinggi ____ iii
Wakil Walikota Bukittinggi ____ iv
Sekretaris Daerah Kota Bukittinggi ____ v
Ketua DPRD Kota Bukittinggi ____ vi
Walikota Dari Masa Ke Masa ____ vii
Sambutan Kepala Arsip Nasional RI ____ ix
Daftar Isi ____ xii
PENDAHULUAN ____ 1
A. Latar Belakang ____ 2
B. Masa Kolonial ____ 3
C. Masa Pergerakan Nasional ____ 5
D. Masa Pendudukan Jepang ____ 6
E. Masa Republik Indonesia ____ 6
F. Daftar Pustaka ____ 9
CITRA KOTA BUKITTINGGI DALAM ARSIP ____ 11
A. Geografis ____ 12
B. Politik dan Pemerintahan ____ 21
C. Pendidikan ____ 42
D. Perekonomian ____ 49
E. Transportasi ____ 62
F. Infrastruktur ____ 65
G. Keagamaan ____ 99
H. Sosial Budaya ____ 112
Daftar Arsip ____ 123
Penutup ____ 133

PENDAHULUAN

PENDAHULUAN

CITRA KOTA BUKITTINGGI DALAM ARSIP

A. LATAR BELAKANG

Kota Bukittinggi merupakan salah satu kota terpenting di Indonesia, kota ini pernah menjadi ibu kota Indonesia pada masa Pemerintahan Darurat Republik Indonesia. Kota ini juga pernah menjadi ibu kota Provinsi Sumatera dan Provinsi Sumatera Tengah. Bahkan sejak masa kolonial pun, telah terkenal dengan nama Fort de Kock yang dijuluki sebagai *Parijs van Sumatra*.

Kota ini juga merupakan tempat kelahiran beberapa tokoh pendiri Republik Indonesia, di antaranya adalah Mohammad Hatta dan H. Agus Salim. Selain sebagai kota perjuangan, Bukittinggi juga terkenal sebagai kota wisata yang berhawa sejuk, dan bersaudara (sister city) dengan Seremban di Negeri Sembilan, Malaysia. Tempat wisata yang ramai dikunjungi adalah Jam Gadang, yaitu sebuah menara jam yang terletak di jantung kota sekaligus menjadi simbol bagi kota yang berada di tepi Ngarai Sianok.

Kota Bukittinggi terletak pada rangkaian Bukit Barisan yang membujur sepanjang pulau Sumatera, dan dikelilingi oleh dua gunung berapi yaitu Gunung Singgalang dan Gunung Marapi. Kota ini berada pada ketinggian 909-941 meter di atas permukaan laut, dan memiliki hawa cukup sejuk dengan suhu berkisar antara 16.1-24.9 °C. Sementara itu, dari total luas wilayah Kota Bukittinggi saat ini (25,24 km^2), 82,8% telah

diperuntukkan menjadi lahan budidaya, sedangkan sisanya merupakan hutan lindung.

Kota ini memiliki topografi berbukit-bukit dan berlembah, beberapa bukit tersebut tersebar dalam wilayah perkotaan, di antaranya Bukit Ambacang, Bukit Tambun Tulang, Bukit Mandiangin, Bukit Campago, Bukit Kubangankabau, Bukit Pinang Nan Sabatang, Bukit Canggang, Bukit Paninjauan, dan sebagainya. Selain itu, terdapat lembah yang dikenal dengan Ngarai Sianok dengan kedalaman yang bervariasi antara 75–110 m, yang di dasarnya mengalir sebuah sungai yang disebut dengan Batang Masang. Luas Bukittinggi saat ini secara *de jure* adalah 145,29 km², mengacu pada Peraturan Pemerintah nomor 84 tahun 1999.

Saat ini Bukittingi merupakan kota terpadat di Provinsi Sumatera Barat, dengan tingkat kepadatan mencapai 4.400 jiwa/km². Jumlah angkatan kerja sebanyak 52.631 orang dan sekitar 3.845 orang di antaranya merupakan pengangguran. Kota ini didominasi oleh etnis Minangkabau, namun terdapat juga etnis Tionghoa, Jawa, Tamil, dan Batak.

B. MASA KOLONIAL

Sejarah berdirinya Kota Bukittinggi diawali dengan adanya sebuah pasar yang berdiri serta dikelola oleh penghulu Nagari Kurai. Orang Minangkabau biasa menyebutnya Pakan. Pakan ini hanya buka pada hari Sabtu saja dan lama-kelamaan pengunjung yang datang semakin ramai. Pada akhirnya pakan ini dibuka juga pada hari Rabu. Pakan tersebut terletak di perbukitan yang tinggi sehingga disebut Bukittinggi untuk

pasar di negeri Kurai tersebut. Akan tetapi, seiring berjalannya waktu pasar itu kemudian berubah nama menjadi pasar ateh. Sementara nama Bukittinggi sendiri menjadi julukan untuk negeri Kurai.

Pada sumber lainya menyebutkan bahwa pasar itu diberi nama Bukik Kubangan Kabau. Terjadi pertemuan adat Suku Kurai yang kemudian mengganti nama menjadi Bukik Nan Tatinggi. Nama Bukik (Bukit) yang terakhir itulah yang kemudian menjadi Bukittinggi. Sedangkan nama pasar Kurai menjadi Pasar Bukittinggi.

Sejarah berdirinya Kota Bukittinggi juga tidak bisa dilepaskan dari masa penjajahan Belanda. Pada tahun 1833 telah terjadi perjanjian Plakat Panjang yang berisi bahwa Nagari Kurai menjadi pusat kegiatan ekonomi Fort de Kock. Nagari Kurai ini merupakan salah satu nagari yang ada di daerah Luhak (kabupaten) Agam serta terdiri dari Lima Jorong. Sebenarnya sebelum Belanda datang ke Dataran Tinggi Agam pada 1823, Pasar Bukittinggi ini sudah ramai didatangi oleh penduduk.

Sekitar tahun 1825-1826 didirikan benteng Fort de Kock di Bukit Jirek – 300 meter sebelah utara Pasar Bukittinggi. Benteng tersebut dibangun oleh Kepala Opsir Militer Belanda untuk Dataran Tinggi Agam yang bernama Kapten Bauer. Nama benteng itu sendiri diambil dari nama Komandan Militer dan Wakil Gubernur Jendral Hindia Belanda. Fungsi dari dibangunnya Benteng tersebut adalah untuk membantu Kaum Adat dalam menghadapi Kaum Paderi (Agama). Sejak saat itulah pemerintah Hindia Belanda menyebut kawasan itu sebagai Fort de Kock. Sedangkan warga Minangkabau tetap menyebut daerah tersebut

dengan Bukittinggi. Pda tahun 1861, benteng ini mengalami perluasan .*(ANRI : Bt 5 Mei 1861 N0. 37)*

Sejak tahun 1918 Kota Bukittinggi telah berstatus *Gemeente* Fort De Kock dan kemudian menjadi *Staadgemente* Fort De Kock, sebagaimana diatur dalam *Staadblad* No. 358 tahun 1938 yang luas wilayahnya sama dengan wilayah Kota Bukittinggi sekarang dan juga berfungsi sebagai ibu kota *Afdeeling* Padangsche Bovenlanden dan *Onderafdeeling* Oud Agam. *(ANRI: Binnenlandsch Bestuur No. 1523)*

C. MASA PERGERAKAN NASIONAL

Pada masa kolonial Belanda, kota ini telah menjadi pusat pendidikan di Pulau Sumatera. Dimulai sejak tahun 1872, dengan berdirinya *Kweekschool voor Inlandsche Onderwijzers* (sekolah guru untuk guru-guru bumiputra) atau dikenal juga dengan nama sekolah radja, yang selanjutnya berkembang menjadi *volksschool* atau sekolah rakyat. (*ANRI: Besluit 1 April 1856 No. 13)*

Kemudian pada tahun 1912 muncul *Hollandsch Inlandsche School* (*HIS),* yang dilanjutkan dengan berdirinya Sekolah Pamong *Opleiding School voor Inlandsch Ambtenaren (OSVIA*) tahun 1918. Pada tahun 1926 juga telah berdiri MULO di Kota Bukittinggi. Pada masa awal kemerdekaan di kota ini pernah berdiri sekolah Polwan dan Kadet serta sekolah Pamong Praja yang pertama di Indonesia.

Sekitar tahun 1924 di kota ini juga telah terbit surat kabar periodik yang dipimpin oleh S. Moesjafir, kemudian disusul penerbitan surat kabar mingguan Doenia Achirat oleh Sain al Malik dan Soetan Perpatih,

namun surat kabar ini tidak berumur panjang. Selain itu beberapa tokoh pers wanita di kota ini seperti Djanewar Djalil dan Sjamsidar Jahja juga menerbitkan surat kabar Soeara Poetri yang mengetengahkan beberapa isu emansipasi wanita.

D. MASA PENDUDUKAN JEPANG

Pada masa pendudukan Jepang, Bukittinggi dijadikan sebagai pusat pengendalian pemerintahan militernya untuk kawasan Sumatera, bahkan sampai ke Singapura dan Thailand. Kota ini menjadi tempat kedudukan komandan militer ke-25 Kempetai, di bawah pimpinan Mayor Jenderal Hirano Toyoji. Kemudian kota ini berganti nama dari *Stadsgemeente* Fort de Kock menjadi Bukittinggi *Si Yaku Sho* yang daerahnya diperluas dengan memasukkan nagari-nagari sekitarnya seperti Sianok Anam Suku, Gadut, Kapau, Ampang Gadang, Batu Taba, dan Bukit Batabuah. Sekarang nagari-nagari tersebut masuk ke dalam wilayah Kabupaten Agam. Bahkan di kota ini pernah didirikan pemancar radio terbesar untuk Pulau Sumatera, dalam rangka mengobarkan semangat rakyat untuk menunjang kepentingan Perang Asia Timur Raya versi Jepang.

E. MASA REPUBLIK INDONESIA

Setelah kemerdekaan Indonesia, Bukittinggi ditetapkan sebagai Ibu Kota Provinsi Sumatera, dengan gubernurnya Mr. Teuku Muhammad Hasan dan Walikotanya yang pertama yaitu Bermawi Sutan Rajo Ameh. Kemudian Bukittinggi juga ditetapkan sebagai wilayah pemerintahan kota berdasarkan Ketetapan Gubernur Provinsi Sumatera Nomor 391 tanggal 9 Juni 1947.

Pada masa mempertahankan kemerdekaan Indonesia, Kota

Bukitinggi berperan sebagai kota perjuangan, ketika pada tanggal 19 Desember 1948 kota ini ditunjuk sebagai Ibu Kota Negara Indonesia setelah Yogyakarta jatuh ke tangan Belanda atau dikenal dengan Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI). Di kemudian hari, peristiwa ini ditetapkan sebagai Hari Bela Negara, berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia tanggal 18 Desember 2006.

Selanjutnya Kota Bukittinggi menjadi kota besar berdasarkan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang pembentukan daerah otonom kota besar dalam lingkungan daerah Provinsi Sumatera Tengah (*ANRI: Sekkab UU No. 185).*

Kemudian dalam peraturan Pemerintah Pengganti undang-undang No. 4 tahun 1959 Bukittinggi ditetapkan sebagai Ibu Kota Sumatera Tengah yang meliputi keresidenan-keresidenan Sumatera Barat, Jambi dan Riau yang sekarang masing-masing Keresidenan itu telah menjadi Propinsi-propinsi sendiri.

Setelah Keresidenan Sumatera Barat dikembangkan menjadi Provinsi Sumatera Barat, maka Bukittinggi ditunjuk sebagai Ibu Kota Provinsinya,. semenjak tahun 1958 secara *defacto* Ibukota Provinsi telah pindah ke Padang namun secara *de yure* barulah tahun 1978 Bukittinggi tidak lagi menjadi Ibukota Provinsi Sumatera Barat, dengan keluarnya Peraturan Pemerintah No. 29 tahun 1979 yang memindahkan Ibukota Provinsi Sumatera Barat ke Padang.

Sekarang ini Bukittinggi berstatus sebagai kota madya Daerah Tingkat II sesuai dengan Undang-Undang No. 5 tahun 1974 tentang

Pokok Pemerintah di Daerah yang telah disempurnakan dengan Undang-Undang No. 22 tahun 1999 menjadi Kota Bukittinggi.

Dalam rangka perluasan wilayah kota, pada tahun 1999 pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 1999 yang isinya menggabungkan nagari-nagari di sekitar Bukittinggi ke dalam wilayah kota. Nagari-nagari tersebut yaitu Cingkariang, Gaduik, Sianok Anam Suku, Guguak Tabek Sarojo, Ampang Gadang, Ladang Laweh, Pakan Sinayan, Kubang Putiah, Pasia, Kapau, Batu Taba, dan Koto Gadang.

DAFTAR PUSTAKA

Staadblats van Nederlandsch-Indie, 310, 1918.

Besluit van Gouverneur General, 25, 1930.

Abdullah, Taufik, (2009), *Schools and Politics: The Kaum Muda Movement in West Sumatra (1927-1933)*, Equinox Publishing,

Asnan, Gusti, (2003), *Kamus sejarah Minangkabau*, Pusat Pengkajian Islam dan Minangkabau,

Azizah, Etek, Mursyid A. M., Arfan B. R., (2008), *Kelah sang demang Jahja Datoek Kajo: pidato otokritik di Volkstraad, 1927-1939*, PT LKiS Pelangi Aksara,

Badan Koordinasi Tata Ruang Nasional, (1999), *Profil 111 kawasan andalan Indonesia: Kawasan barat Indonesia*, Badan Koordinasi Tata Ruang Nasional

Daniel Dhakidae, ed. (2003). *Profil Daerah: Kabupaten dan Kota Jilid 2*. Penerbit Buku Kompas.

Hakiem, Lukman, (2008), *100 tahun Mohammad Natsir: berdamai dengan sejarah*, Penerbit Republika,

Haris, Syamsuddin, (2004), *Desentralisasi dan otonomi daerah: Naskah akademik dan RUU usulan LIPI*, Yayasan Obor Indonesia,

Hasan, Teuku Moehammad; Teuku Mohammad Isa (1991). *Meester Teuku Moehammad Hasan memoir gubenur Sumatera dari Aceh ke pemersatu bangsa*. Papas Sinar Sinanti.

Nasution, A.H. (1978). *Sekitar Perang Kemerdekaan Indonesia. Jilid II*. Bandung: Angkasa.

Poesponegoro, Marwati D. dan Nugroho Notosusanto (2007). *Sejarah*

Nasional Indonesia I Edisi Pemutakhiran. Jakarta: Balai Pustaka

Shimer, Barbara Gifford & Guy Hobbs, (2010), *The Kenpeitai in Java and Sumatra*, Equinox Publishing,

Sujamto, (1991), *Cakrawala otonomi daerah*, Sinar Grafika,

Toer, Pramoedya Ananta, Koesalah Soebagyo Toer, Ediati Kamil; *Kronik Revolusi Indonesia: 1947*, Kepustakaan Populer Gramedia, 2001

Yayasan Bhakti Wawasan Nusantara (1992). *Profil Provinsi Republik Indonesia: Sumatra Barat* . Jakarta: Yayasan Bhakti Nusantara

Zed, Mestika, Eddy Utama, Hasril Chaniago. *Sumatera Barat di Panggung Sejarah, 1945-1995*; Panitia Peringatan 50 Tahun RI, 1995.

www.sumbar.go.id

www.bukittinggikota .go.id

www.historyalofbukittinggi.blogspot.com

CITRA KOTA BUKITTINGGI DALAM ARSIP

GEOGRAFIS

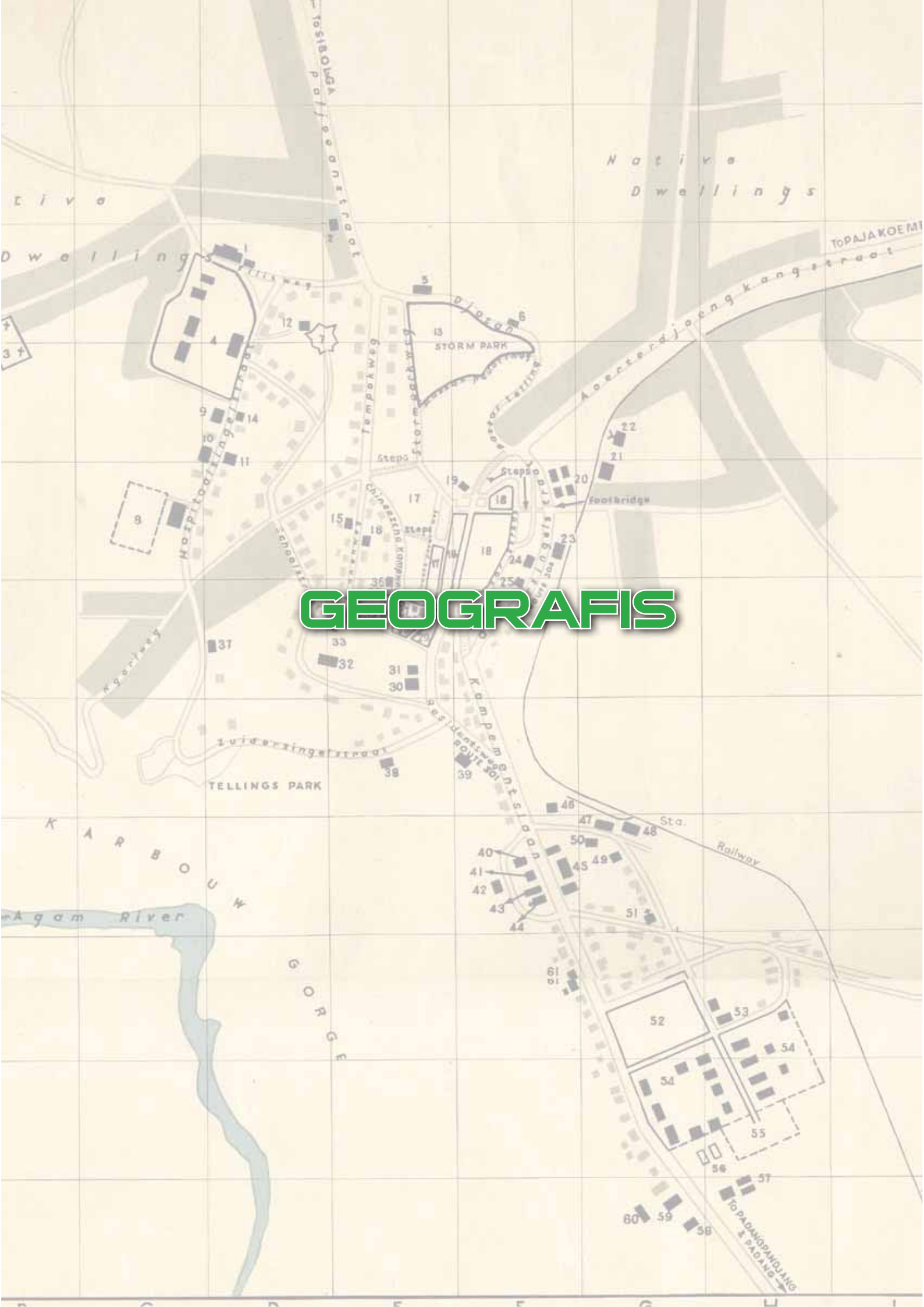

Native Dwellings
STORM PARK
Steps
Footbridge
TELLINGS PARK
Sta.
Railway
KARBOUW GORGE
Agam River

Kota Bukittinggi terletak pada rangkaian Bukit Barisan yang membujur sepanjang pulau Sumetera dan dikelilingi oleh dua gunung berapi. Kota Bukittinggi dengan ketinggian 909–941 meter di atas permukaan laut memiliki hawa cukup sejuk. Kota Bukittinggi memiliki topografi berbukit-bukit dan berlembah, beberapa bukit tersebut tersebar dalam wilayah perkotaan. Selain itu, terdapat lembah yang dikenal dengan nama **Ngarai Sianok**, dikenal dengan sebutan celah **Karbauwen** oleh Pemerintah Hindia Belanda, memiliki kedalaman yang bervariasi yang di dasarnya mengalir sebuah sungai yang disebut dengan Batang Masang.

Foto udara belahan ngarai, disebut celah *kerbauwen* di Fort de Kock, Sumatera Barat, [1930]
Sumber: ANRI, KIT Sumbar 755/77

Pemandangan sawah-sawah di Lubuk Sikaping, Fort de Kock, Sumatera Barat, [1930].
Sumber: ANRI, KIT Sumbar 936/85

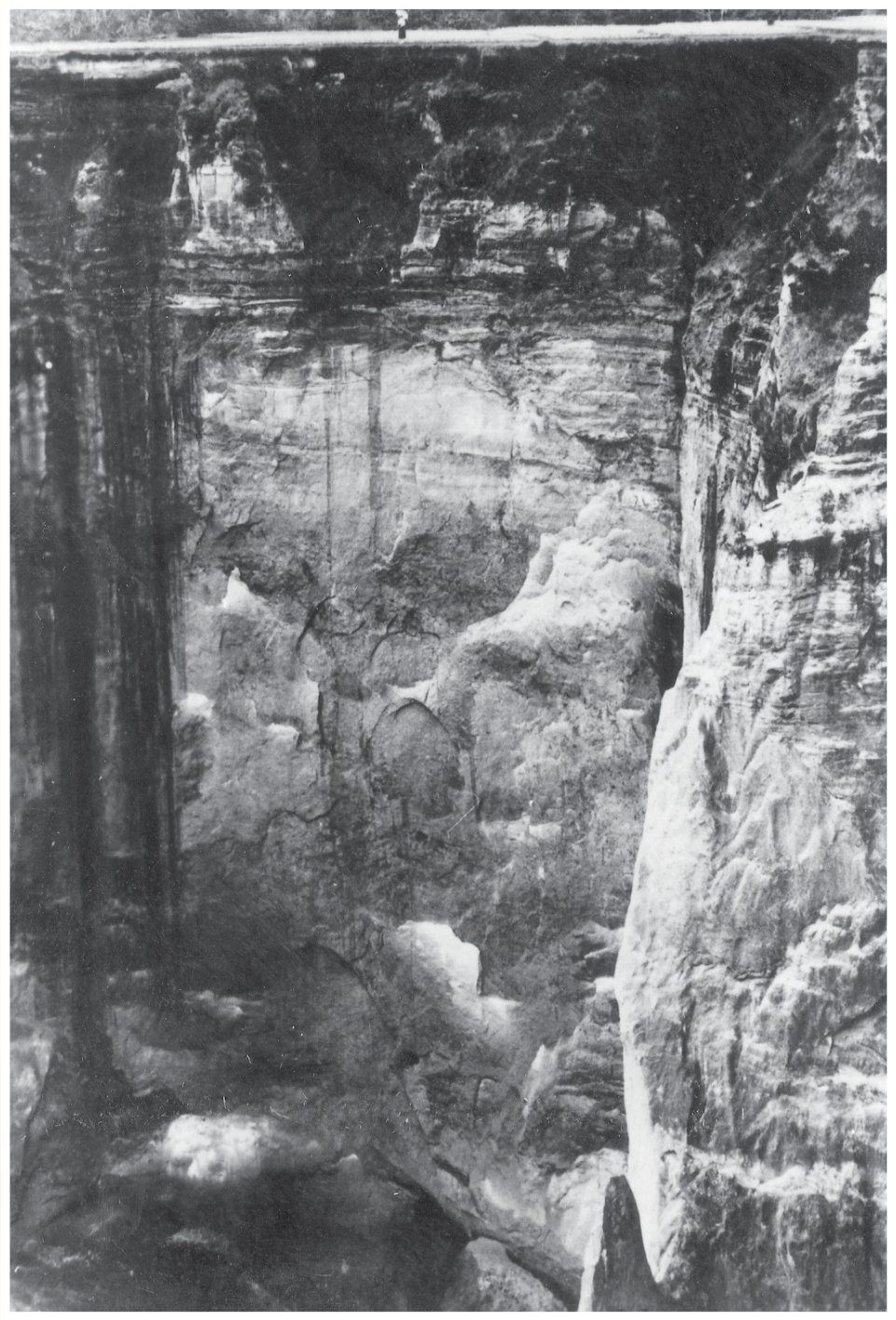

Belahan ngarai celah *kerbauwen* di Fort de Kock, Sumatera Barat, [1930].
Sumber: ANRI, KIT Sumbar 936/79

Pemandangan lembah atau ngarai di Fort de Kock, Sumatera Barat, 1931.
Sumber: ANRI, KIT Sumbar 935/41

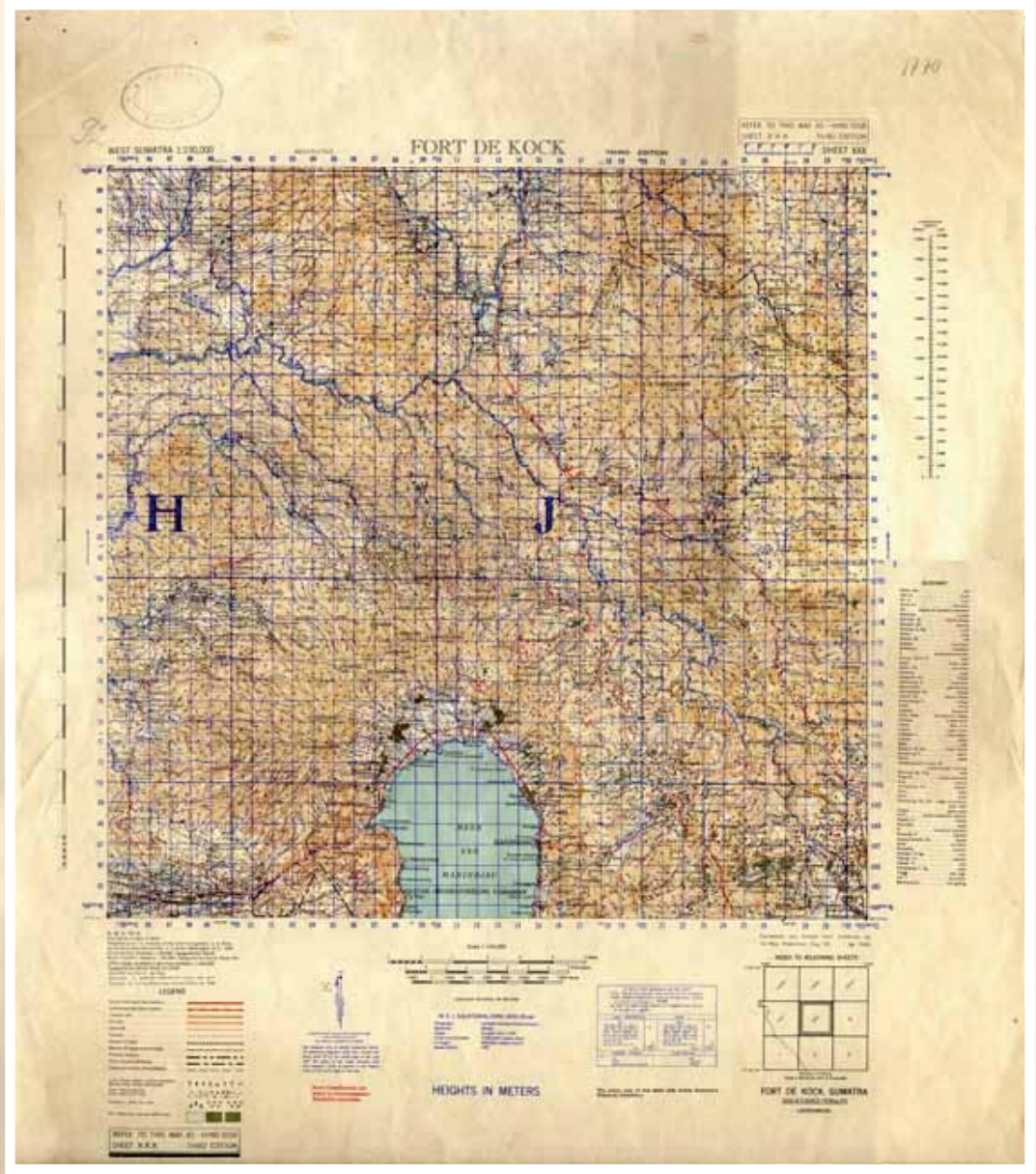

Peta Fort de Kock, 1943.

Sumber: ANRI, Kartografi Indonesia Sheet 17-18 XIX-XX

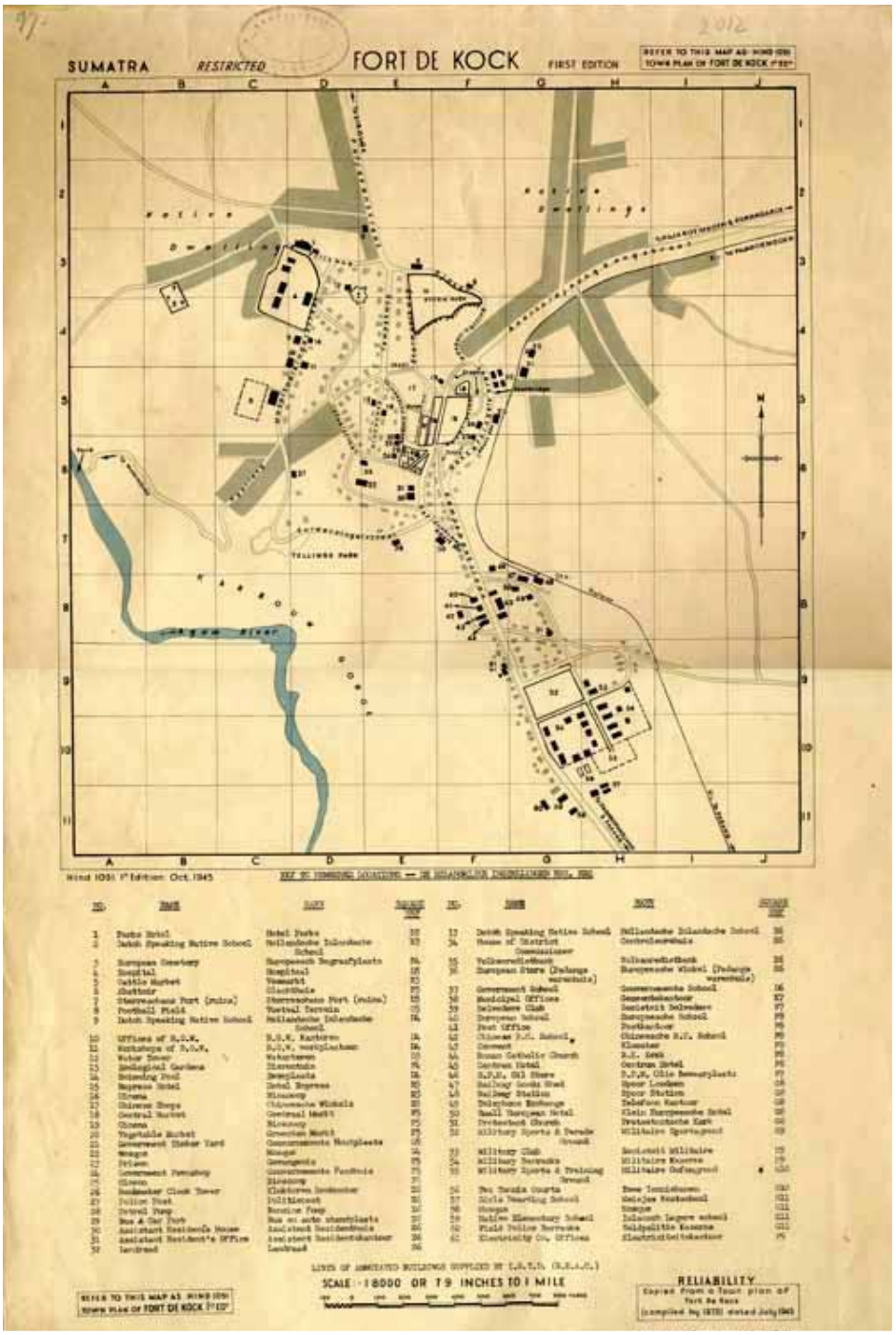

Peta Fort de Kock , 1945.

Sumber: ANRI, Kartografi Indonesia No.2012

Peta Fort de Kock, 1946.
Sumber: ANRI, Kartografi Indonesia Sheet XXX

POLITIK DAN PEMERINTAHAN

Kota kecil yang pada tahun 1825 oleh Pemerintah Hindia Belanda dijadikan tempat pos pertahanan di luar dan benteng, dinamai Gubernur Jenderal Hindia Belanda saat itu, Merkus de Kock. Karena letaknya yang strategis, pembangunan Kota yang akhirnya disebut dengan **Fort de Kock** (Benteng de Kock) pun berkembang. Dengan mendatangkan peralatan dari Eropa, perluasan jalur kereta pada tahun 1845 diperluas. Perkampungan militer diperluas dan dibangun di selatan benteng pada tahun 1861. Sejak tahun 1918 Fort de Kock telah berstatus sebuah stadsgemeente (kota) juga berfungsi sebagai ibu kota *Afdeeling Padangsche Bovenlanden dan Onderafdeeling Oud Agam*. Wilayah kota diperluas pada tahun 1930. Saat ini batas wilayah pemerintahan kota dikelilingi oleh Kabupaten Agam.

Aktifitas putra daerah kelahiran Bukittinggi, sebagai Tokoh Nasional seperti Haji Agus Salim (lahir tahun 1884), pemimpin Serikat Islam dan

Menteri Muda Luar Negeri pada Kabinet Syahrir II serta Mohammad Hatta (lahir tahun 1902), Proklamator Kemerdekaan RI, Wakil Presiden RI Pertama dan Bapak Koperasi Indonesia memberi warna sendiri dalam sejarah perjalanan politik dan pemerintah bangsa Indonesia.

Pasca Kemerdekaan Republik Indonesia, seperti yang tercantum pada Undang-undang No.10 Tahun 1948 tentang Pemerintahan Sumatera ditetapkan menjadi Provinsi Sumetera Tengah yang berkedudukan di **Kota Bukittinggi**. Kota Bukittinggi juga sebagai Ibukota Indonesia pada masa Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI). Pentingnya Kota Bukittinggi ditandai dengan kunjungan Wakil Presiden RI, Moh.Hatta ke di tahun 1954. Dinamika pemerintahan pada masa itu sangat beragam, seperti yang dilaporkan tentang Pembentukan Daerah Otonom di tahun 1956.

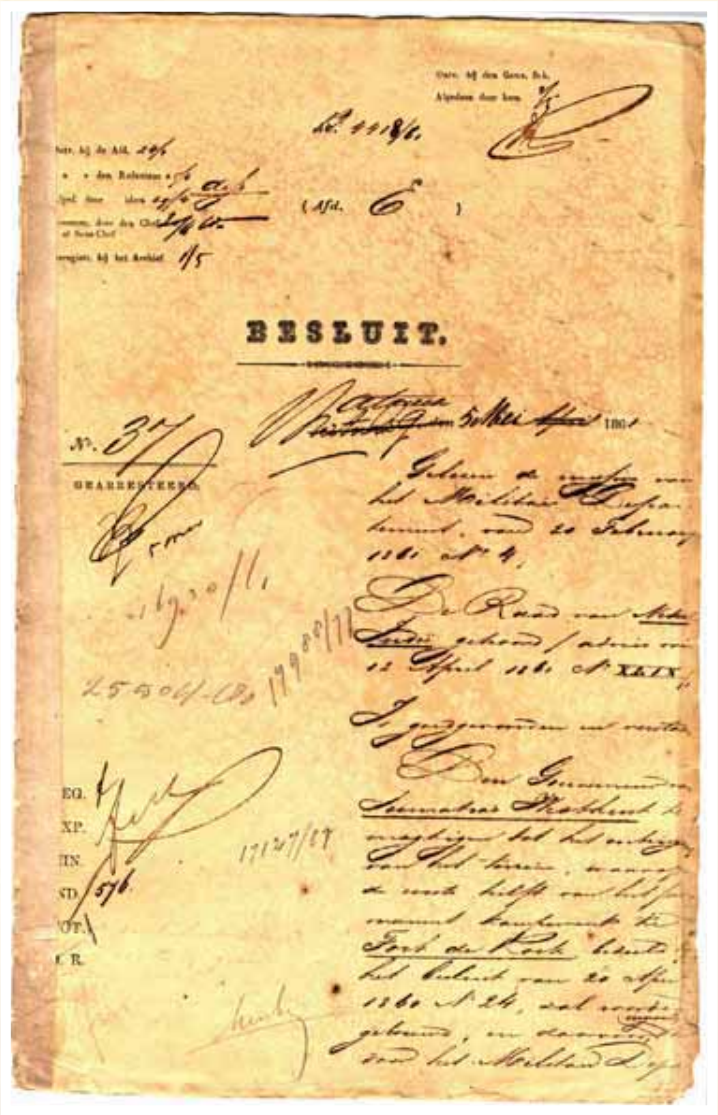

BESLUIT.

Surat Keputusan Gubernur Jenderal Hindia Belanda No. 37 Tahun 1861 tentang pembelian tanah datar di bagian selatan Fort de Kock seharga f 46.092 yang akan digunakan sebagai perkampungan militer, 5 Mei 1861.

Sumber: ANRI, Bt 5 Mei 1861 N0. 37

Kunjungan Gubernur Jenderal ke Benteng Fort de Kock, Sumatera Barat, [1930].
Sumber: ANRI, KIT Sumbar 324/32

Rumah Kontrolir, Kantor Pos di Fort de Kock,
Sumatera Barat, [1930].
Sumber: ANRI, KIT Sumbar 826/81

Rumah Residen di Fort de Kock, Sumatera Barat, [1930].
Sumber: ANRI, KIT Sumbar 176/50

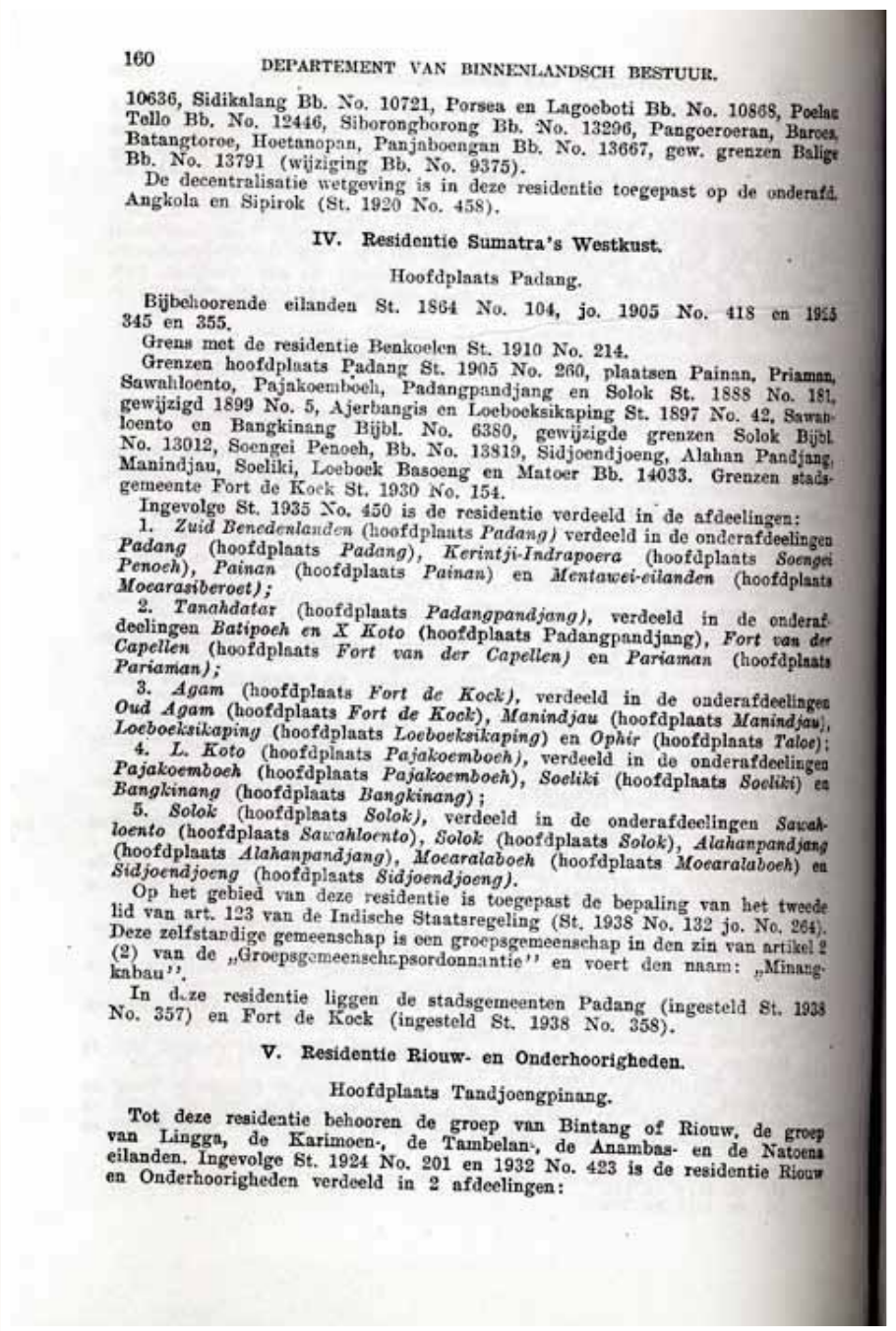

160 DEPARTEMENT VAN BINNENLANDSCH BESTUUR.

10636, Sidikalang Bb. No. 10721, Porsea en Lagoeboti Bb. No. 10868, Poelau Tello Bb. No. 12446, Siborongborong Bb. No. 13296, Pangoeroeran, Baroes, Batangtoroe, Hoetanopan, Panjaboengan Bb. No. 13667, gew. grenzen Balige Bb. No. 13791 (wijziging Bb. No. 9375).

De decentralisatie wetgeving is in deze residentie toegepast op de onderafd. Angkola en Sipirok (St. 1920 No. 458).

IV. Residentie Sumatra's Westkust.

Hoofdplaats Padang.

Bijbehoorende eilanden St. 1864 No. 104, jo. 1905 No. 418 en 1935 345 en 355.

Grens met de residentie Benkoelen St. 1910 No. 214.

Grenzen hoofdplaats Padang St. 1905 No. 260, plaatsen Painan, Priaman, Sawahloento, Pajakoemboeh, Padangpandjang en Solok St. 1888 No. 181, gewijzigd 1899 No. 5, Ajerbangis en Loeboeksikaping St. 1897 No. 42, Sawahloento en Bangkinang Bijbl. No. 6380, gewijzigde grenzen Solok Bijbl. No. 13012, Soengei Penoeh, Bb. No. 13819, Sidjoendjoeng, Alahan Pandjang, Manindjau, Soeliki, Loeboek Basoeng en Matoer Bb. 14033. Grenzen stadsgemeente Fort de Kock St. 1930 No. 154.

Ingevolge St. 1935 No. 450 is de residentie verdeeld in de afdeelingen:

1. *Zuid Benedenlanden* (hoofdplaats *Padang*) verdeeld in de onderafdeelingen *Padang* (hoofdplaats *Padang*), *Kerintji-Indrapoera* (hoofdplaats *Soengei Penoeh*), *Painan* (hoofdplaats *Painan*) en *Mentawei-eilanden* (hoofdplaats *Moearasiberoet*);

2. *Tanahdatar* (hoofdplaats *Padangpandjang*), verdeeld in de onderafdeelingen *Batipoeh en X Koto* (hoofdplaats Padangpandjang), *Fort van der Capellen* (hoofdplaats *Fort van der Capellen*) en *Pariaman* (hoofdplaats *Pariaman*);

3. *Agam* (hoofdplaats *Fort de Kock*), verdeeld in de onderafdeelingen *Oud Agam* (hoofdplaats *Fort de Kock*), *Manindjau* (hoofdplaats *Manindjau*), *Loeboeksikaping* (hoofdplaats *Loeboeksikaping*) en *Ophir* (hoofdplaats *Taloe*);

4. *L. Koto* (hoofdplaats *Pajakoemboeh*), verdeeld in de onderafdeelingen *Pajakoemboeh* (hoofdplaats *Pajakoemboeh*), *Soeliki* (hoofdplaats *Soeliki*) en *Bangkinang* (hoofdplaats *Bangkinang*);

5. *Solok* (hoofdplaats *Solok*), verdeeld in de onderafdeelingen *Sawahloento* (hoofdplaats *Sawahloento*), *Solok* (hoofdplaats *Solok*), *Alahanpandjang* (hoofdplaats *Alahanpandjang*), *Moearalaboeh* (hoofdplaats *Moearalaboeh*) en *Sidjoendjoeng* (hoofdplaats *Sidjoendjoeng*).

Op het gebied van deze residentie is toegepast de bepaling van het tweede lid van art. 123 van de Indische Staatsregeling (St. 1938 No. 132 jo. No. 264). Deze zelfstandige gemeenschap is een groepsgemeenschap in den zin van artikel 2 (2) van de „Groepsgemeenschapsordonnantie" en voert den naam: „Minangkabau".

In deze residentie liggen de stadsgemeenten Padang (ingesteld St. 1938 No. 357) en Fort de Kock (ingesteld St. 1938 No. 358).

V. Residentie Riouw- en Onderhoorigheden.

Hoofdplaats Tandjoengpinang.

Tot deze residentie behooren de groep van Bintang of Riouw, de groep van Lingga, de Karimoen-, de Tambelan-, de Anambas- en de Natoena eilanden. Ingevolge St. 1924 No. 201 en 1932 No. 423 is de residentie Riouw en Onderhoorigheden verdeeld in 2 afdeelingen:

Afdeeling Agam di Keresidenan Sumatra's Westkust dengan Ibu Kota Fort De Kock menurut staatsblad 1935 No. 450

Sumber: ANRI, Regeerings Almanak 1939

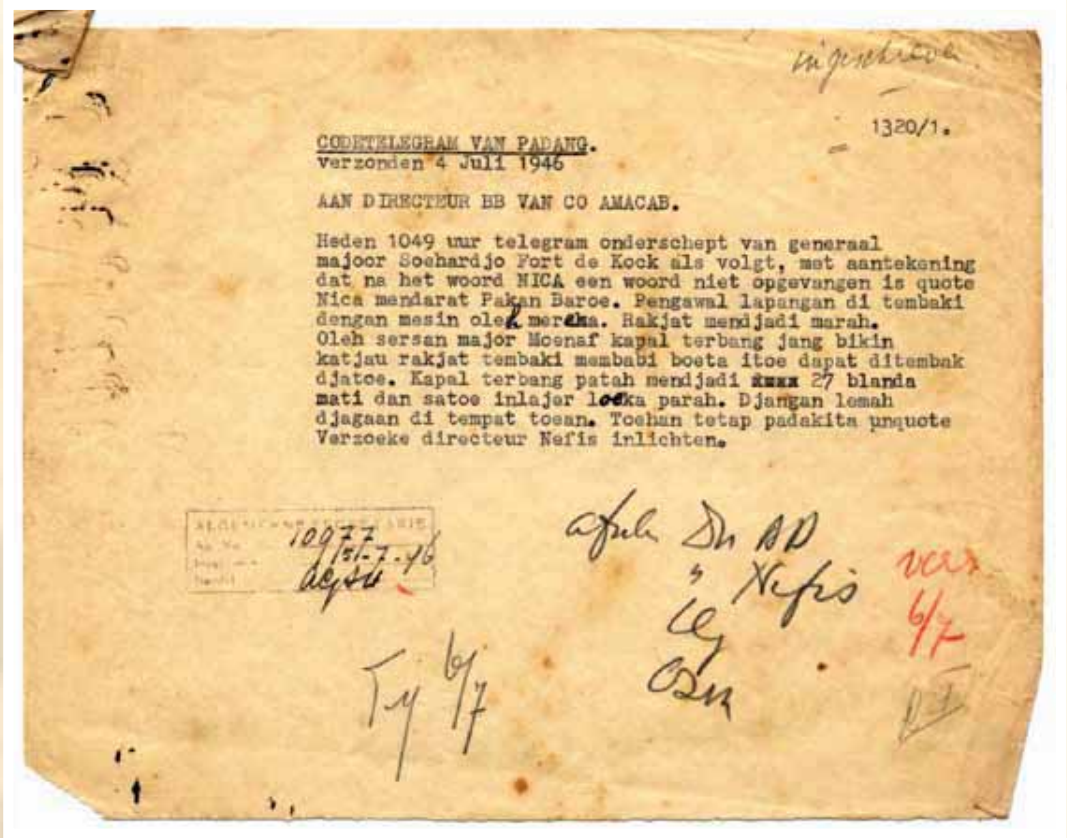

1320/1.

CODETELEGRAM VAN PADANG.
Verzonden 4 Juli 1946

AAN DIRECTEUR BB VAN CO AMACAB.

Heden 1049 uur telegram onderschept van generaal majoor Soehardjo Fort de Kock als volgt, met aantekening dat na het woord NICA een woord niet opgevangen is quote Nica mendarat Pakan Baroe. Pengawal lapangan di tembaki dengan mesin oleh mereka. Rakjat mendjadi marah. Oleh sersan major Moenaf kapal terbang jang bikin katjau rakjat tembaki membabi boeta itoe dapat ditembak djatoe. Kapal terbang patah mendjadi 27 blanda mati dan satoe inlajer loeka parah. Djangan lemah djagaan di tempat toean. Toehan tetap padakita unquote Verzoeke directeur Nefis inlichten.

Telegram dari Mayor Jenderal Soehardjo di Fort de Kock tentang berita jatuhnya kapal terbang Belanda di Pakan Baru, 4 Juli 1946.

Sumber: ANRI, Algemeene Secretarie Ag No. 10977/1946

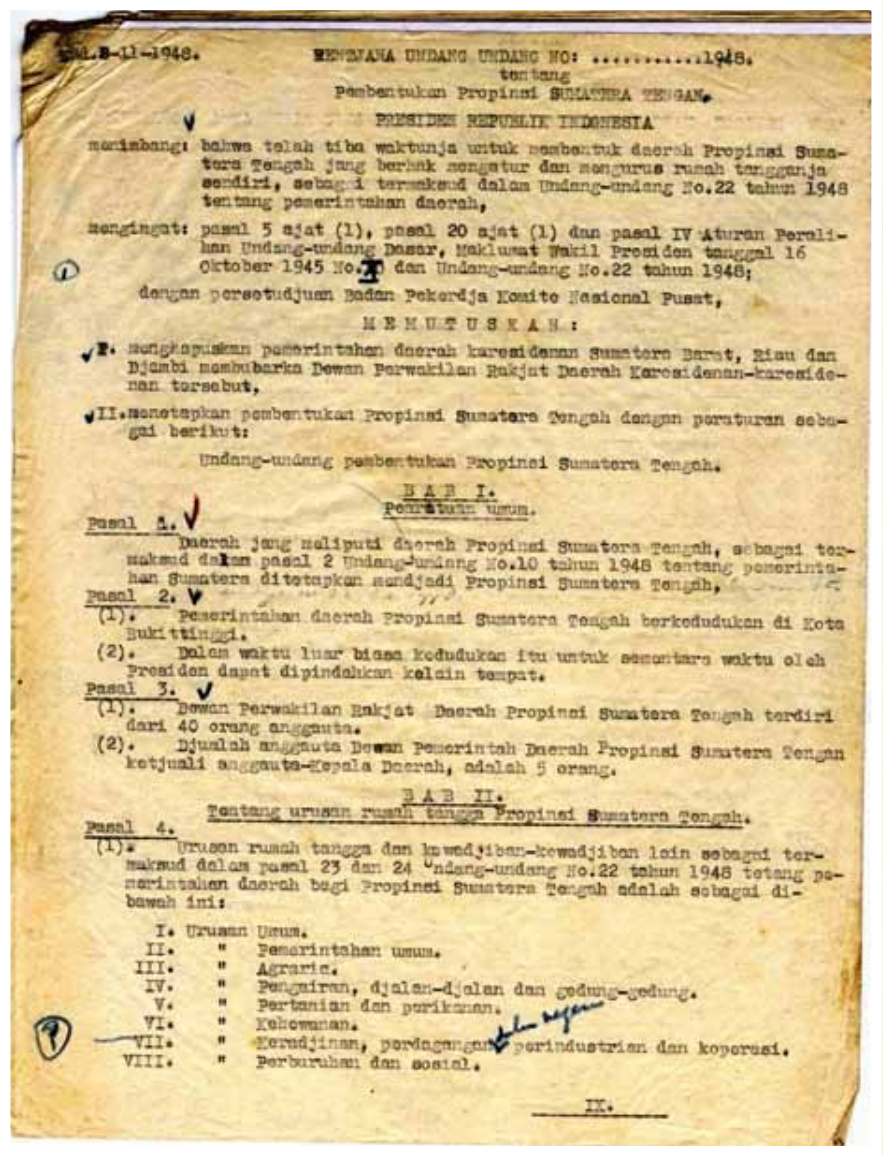

TMLB-11-1948. RENTJANA UNDANG UNDANG NO: .....1948.
tentang
Pembentukan Propinsi SUMATERA TENGAH.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

menimbang: bahwa telah tiba waktunja untuk membentuk daerah Propinsi Sumatera Tengah jang berhak mengatur dan mengurus rumah tangganja sendiri, sebagai termaksud dalam Undang-undang No.22 tahun 1948 tentang pemerintahan daerah,

mengingat: pasal 5 ajat (1), pasal 20 ajat (1) dan pasal IV Aturan Peralihan Undang-undang Dasar, Maklumat Wakil Presiden tanggal 16 Oktober 1945 No.[illegible] dan Undang-undang No.22 tahun 1948;

dengan persetudjuan Badan Pekerdja Komite Nasional Pusat,

M E M U T U S K A N :

I. menghapuskan pemerintahan daerah karesidenan Sumatera Barat, Riau dan Djambi membubarka Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Karesidenan-karesidenan tersebut,

II. menetapkan pembentukan Propinsi Sumatera Tengah dengan peraturan sebagai berikut:

Undang-undang pembentukan Propinsi Sumatera Tengah.

B A B I.
Peraturan umum.

Pasal 1.
Daerah jang meliputi daerah Propinsi Sumatera Tengah, sebagai termaksud dalam pasal 2 Undang-undang No.10 tahun 1948 tentang pemerintahan Sumatera ditetapkan mendjadi Propinsi Sumatera Tengah,

Pasal 2.
(1). Pemerintahan daerah Propinsi Sumatera Tengah berkedudukan di Kota Bukittinggi.
(2). Dalam waktu luar biasa kedudukan itu untuk sementara waktu oleh Presiden dapat dipindahkan kelain tempat.

Pasal 3.
(1). Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Propinsi Sumatera Tengah terdiri dari 40 orang anggauta.
(2). Djumlah anggauta Dewan Pemerintah Daerah Propinsi Sumatera Tengah ketjuali anggauta-Kepala Daerah, adalah 5 orang.

B A B II.
Tentang urusan rumah tangga Propinsi Sumatera Tengah.

Pasal 4.
(1). Urusan rumah tangga dan kewadjiban-kewadjiban lain sebagai termaksud dalam pasal 23 dan 24 Undang-undang No.22 tahun 1948 tetang pemerintahan daerah bagi Propinsi Sumatera Tengah adalah sebagai dibawah ini:

I. Urusan Umum.
II. " Pemerintahan umum.
III. " Agraria.
IV. " Pengairan, djalan-djalan dan gedung-gedung.
V. " Pertanian dan perikanan.
VI. " Kehewanan.
VII. " Keradjinan, perdagangan, perindustrian dan koperasi.
VIII. " Perburuhan dan sosial.

IX.

Fragmen (halaman awal) Rancangan Undang-Undang Pembentukan Provinsi Sumatera Tengah, 8 November 1948.
Sumber: ANRI, Sekretaris Negara No. 177

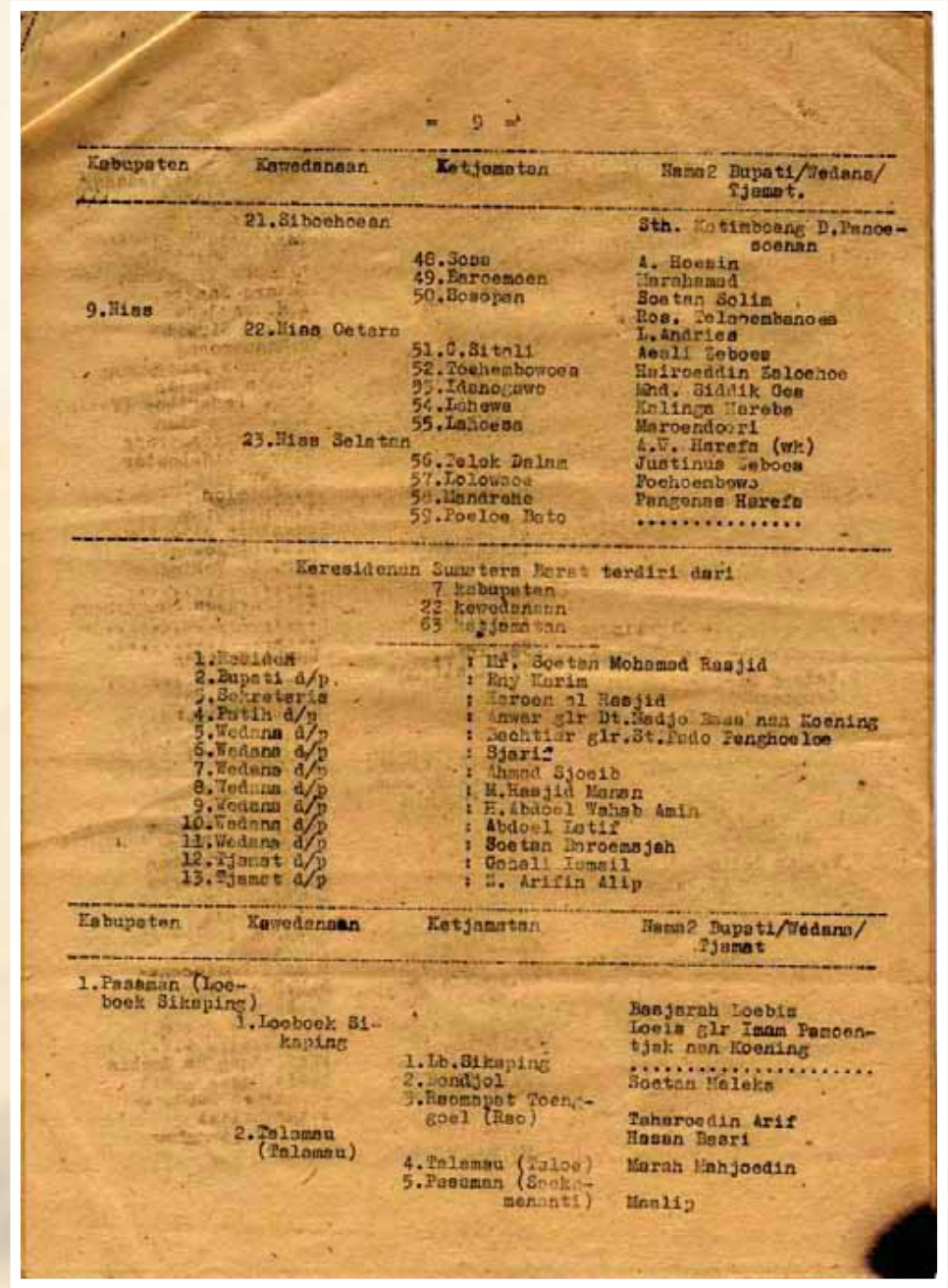

= 9 =

Kabupaten	Kawedanaan	Ketjamatan	Nama2 Bupati/Wedana/ Tjamat.
	21.Siboehoean		Sth. Katimboeng D.Panoe-soenan
		48.Sosa	A. Hoesin
		49.Baroemoen	Marahamad
		50.Sosopan	Soetan Solim
9.Nias			Ros. Telaoembanoes
	22.Nias Oetara		L.Andries
		51.C.Sitali	Aeali Zeboes
		52.Toehembowoea	Hairoeddin Zalochoe
		53.Idanogawo	Mhd. Siddik Oea
		54.Lahewa	Kalinga Harebe
		55.Lahoesa	Maroendoeri
	23.Nias Selatan		A.W. Harefa (wk)
		56.Telok Dalam	Justinus Zeboes
		57.Lolowaoe	Poehoembowo
		58.Mandrehe	Pangenas Harefa
		59.Poeloe Bato	.....

Keresidenan Sumatera Barat terdiri dari
7 kabupaten
22 kawedanaan
63 ketjamatan

1.Residen	: Mr. Soetan Mohamad Rasjid
2.Bupati d/p.	: Eny Karim
3.Sekretaris	: Haroen al Rasjid
4.Patih d/p	: Anwar glr Dt.Madjo Basa nan Koening
5.Wedana d/p	: Bachtiar glr.St.Pado Penghoeloe
6.Wedana d/p	: Sjarif
7.Wedana d/p	: Ahmad Sjoeib
8.Wedana d/p	: M.Rasjid Manan
9.Wedana d/p	: H.Abdoel Wahab Amin
10.Wedana d/p	: Abdoel Latif
11.Wedana d/p	: Soetan Baroemsjah
12.Tjamat d/p	: Gahali Ismail
13.Tjamat d/p	: S. Arifin Alip

Kabupaten	Kawedanaan	Ketjamatan	Nama2 Bupati/Wedana/ Tjamat
1.Pasaman (Loe-boek Sikaping)			
	1.Loeboek Si-kaping		Basjarah Loebis
			Loeis glr Imam Pamoen-tjak nan Koening
		1.Lb.Sikaping	.....
		2.Bondjol	Soetan Maleka
		3.Raomapat Toeng-goel (Rao)	Taharoedin Arif
	2.Talamau (Talamau)		Hasan Basri
		4.Talamau (Taloe)	Marah Mahjoedin
		5.Pasaman (Saeka-menanti)	Maalip

Fragmen Laporan Bureau Indonesia bagian Penerangan Jakarta tentang pembagian daerah dalam Propinsi Sumatera/Kantor Gubernur Sumatera Bukittinggi, Kabupaten, Kawedanaan, Kecamatan dan nama-nama Bupati/Wedana/Camat, 1948.
Sumber: ANRI, Djogja Documenten No. 260

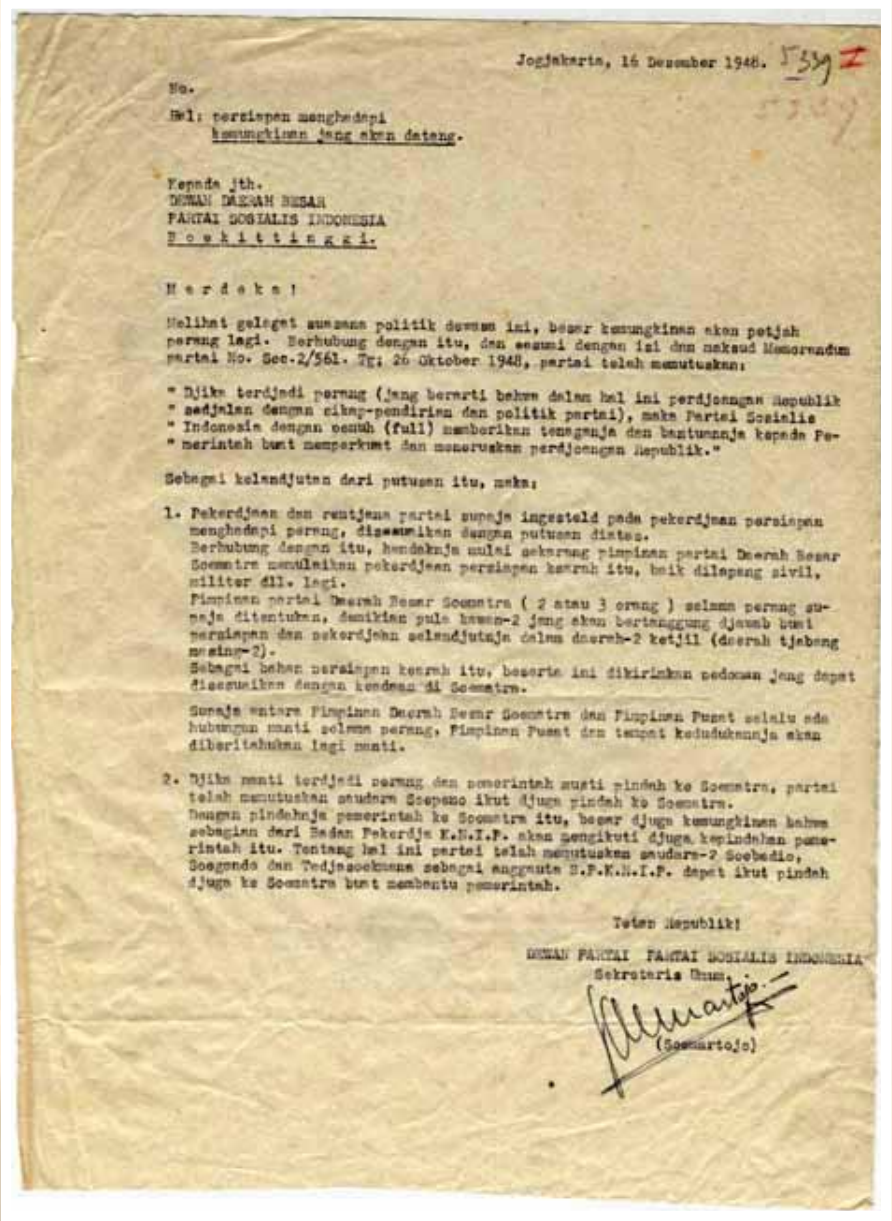

Jogjakarta, 16 Desember 1948.

No.

Hal: persiapan menghadapi
kemungkinan jang akan datang.

Kepada jth.
DEWAN DAERAH BESAR
PARTAI SOSIALIS INDONESIA
B o e k i t t i n g g i.

M e r d e k a !

Melihat geleget suasana politik dewasa ini, besar kemungkinan akan petjah perang lagi. Berhubung dengan itu, dan sesuai dengan isi dan maksud Memorandum partai No. Sec.2/561. Tg: 26 Oktober 1948, partai telah memutuskan:

" Djika terdjadi perang (jang berarti bahwa dalam hal ini perdjoangan Republik
" sedjalan dengan cikal-pendirian dan politik partai), maka Partai Sosialis
" Indonesia dengan penuh (full) memberikan tenaganja dan bantuannja kepada Pe-
" merintah buat memperkuat dan meneruskan perdjoangan Republik."

Sebagai kelandjutan dari putusan itu, maka:

1. Pekerdjaan dan rentjana partai supaja ingesteld pada pekerdjaan persiapan menghadapi perang, disesuaikan dengan putusan diatas.
   Berhubung dengan itu, hendaknja mulai sekarang pimpinan partai Daerah Besar Soematra meneruskan pekerdjaan persiapan kearah itu, baik dilapang sivil, militer dll. lagi.
   Pimpinan partai Daerah Besar Soematra (2 atau 3 orang) selama perang supaja ditentukan, demikian pula kawan-2 jang akan bertanggung djawab buat persiapan dan pekerdjaan selandjutnja dalam daerah-2 ketjil (daerah tjabang masing-2).
   Sebagai bahan persiapan kearah itu, beserta ini dikirimkan pedoman jang dapat disesuaikan dengan keadaan di Soematra.

   Supaja antara Pimpinan Daerah Besar Soematra dan Pimpinan Pusat selalu ada hubungan rapat selama perang, Pimpinan Pusat dan tempat kedudukannja akan diberitahukan lagi nanti.

2. Djika nanti terdjadi perang dan pemerintah musti pindah ke Soematra, partai telah memutuskan saudara Soepeno ikut djuga pindah ke Soematra.
   Dengan pindahnja pemerintah ke Soematra itu, besar djuga kemungkinan bahwa sebagian dari Badan Pekerdja K.N.I.P. akan mengikuti djuga kepindahan pemerintah itu. Tentang hal ini partai telah memutuskan saudara-2 Soebadio, Soegondo dan Tedjasoekmana sebagai anggauta B.P.K.N.I.P. dapat ikut pindah djuga ke Soematra buat membantu pemerintah.

Tetap Republik!

DEWAN PARTAI PARTAI SOSIALIS INDONESIA
Sekretaris Umum,

(Soemartojo)

Surat dari Dewan Partai-Partai Sosialis Indonesia kepada Dewan Daerah Besar Partai Sosialis Indonesia Bukittinggi tentang berbagai macam persiapan menghadapi perang melawan Belanda serta kemungkinan yang terjadi, 16 Desember 1948.
Sumber: ANRI, Djogja Documenten No. 94

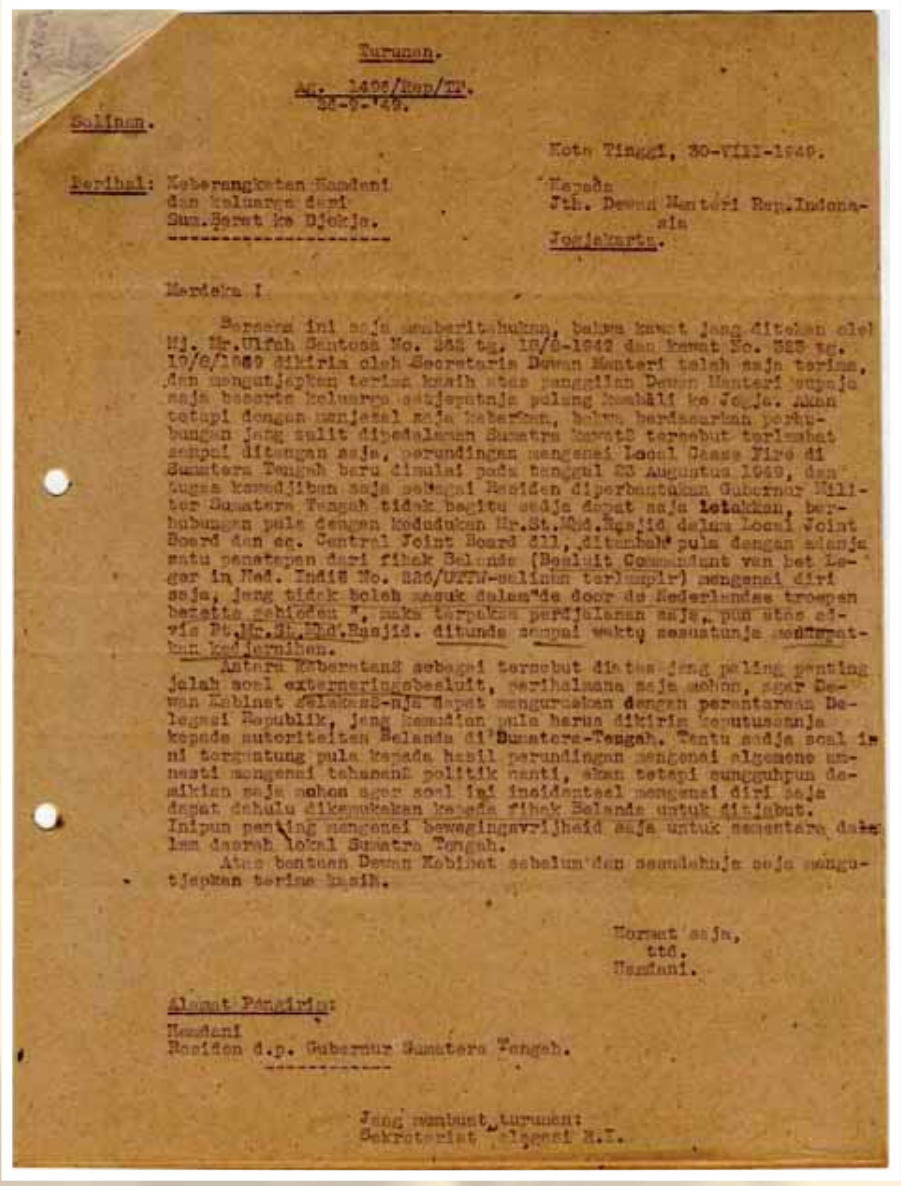

Turunan.

Ag. 1496/Rep/TT.
28-9-'49.

Salinan.

Kota Tinggi, 30-VIII-1949.

Perihal: Keberangkatan Hamdani
dan keluarga dari
Sum.Barat ke Djokja.

Kepada
Jth. Dewan Menteri Rep.Indonesia
Jogjakarta.

Merdeka !

Bersama ini saja memberitahukan, bahwa kawat jang ditekan oleh Mj. Mr.Ulfah Santosa No. 282 tg. 18/8-1949 dan kawat No. 323 tg. 19/8/1949 dikirim oleh Secretaris Dewan Menteri telah saja terima, dan mengutjapkan terima kasih atas panggilan Dewan Menteri supaja saja beserta keluarga setjepatnja pulang kembali ke Jogja. Akan tetapi dengan menjesal saja keberkan, bahwa berdasarkan perhubungan jang sulit dipedalaman Sumatra kawat2 tersebut terlambat sampai ditangan saja, perundingan mengenai Local Cease Fire di Sumatera Tengah baru dimulai pada tanggal 23 Augustus 1949, dan tugas kewadjiban saja sebagai Residen diperbantukan Gubernur Militer Sumatera Tengah tidak begitu sedja dapat saja letakkan, berhubungan pula dengan kedudukan Mr.St.Mhd.Rasjid dalam Local Joint Board dan cq. Central Joint Board dll, ditambah pula dengan adanja satu penetapan dari fihak Belanda (Besluit Commandant van het Leger in Ned. Indië No. 226/UTTW-salinan terlampir) mengenai diri saja, jang tidak boleh masuk dalam"de door de Nederlandse troepen bezette gebieden ", maka terpaksa perdjalanan saja, pun atas advis Pt.Mr.St.Mhd.Rasjid. ditunda sampai waktu sesuatunja menjapatkan kedjernihan.

Antara keberatan2 sebagai tersebut diatas jang paling penting jalah soal externeringsbesluit, perihalmana saja mohon, agar Dewan Kabinet selekas2-nja dapat mengurusakan dengan perantaraan Delegasi Republik, jang kemudian pula harus dikirim keputusannja kepada autoriteiten Belanda di Sumatera-Tengah. Tentu sedja soal ini tergantung pula kepada hasil perundingan mengenai algemene amnesti mengenai tahanan2 politik nanti, akan tetapi sungguhpun demikian saja mohon agar soal ini incidenteel mengenai diri saja dapat dahulu dikemukakan kepada fihak Belanda untuk ditjabut. Inipun penting mengenai bewegingsvrijheid saja untuk sementara dalam daerah lokal Sumatra Tengah.

Atas bantuan Dewan Kabinet sebelum dan sesudahnja saja mengutjapkan terima kasih.

Hormat saja,
ttd.
Hamdani.

Alamat Pengirim:
Hamdani
Residen d.p. Gubernur Sumatera Tengah.

Jang membuat turunan:
Sekretariat Delegasi R.I.

Turunan Surat dari Residen diperbantukan Gubernur Sumatera Tengah, Hamdani kepada Dewan Menteri RI di Jogyakarta tentang penundaaan keberangkatannya dan keluarga dari Sumatera Barat ke Jogyakarta, 30 Agustus 1949.
Sumber: ANRI, Delegasi Indonesia No. 1068

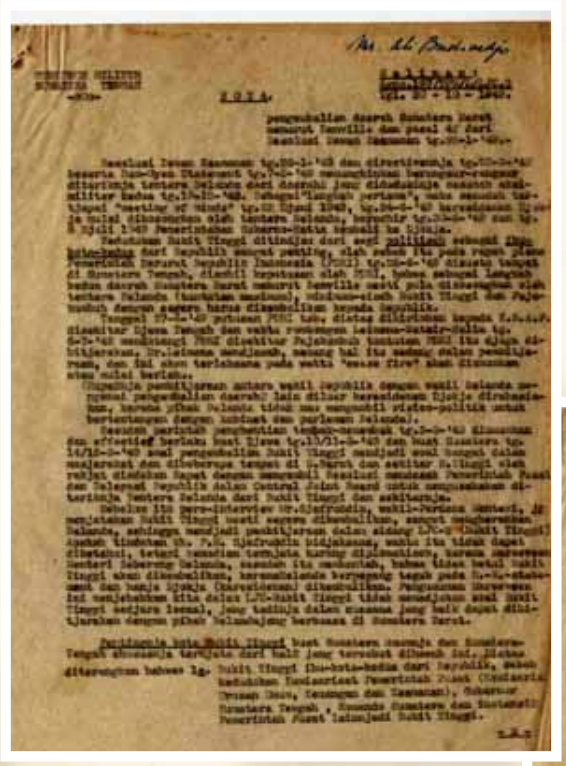

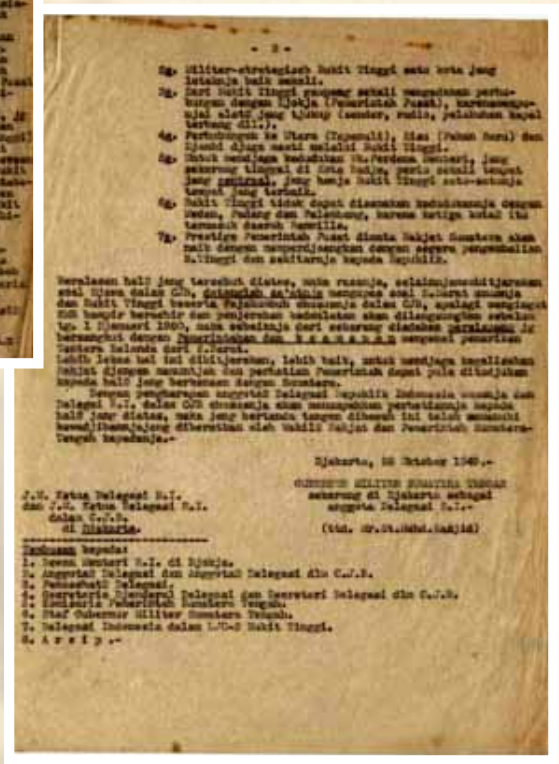

Salinan Nota Gubernur Militer Sumatera Tengah Mr. St. Mohd Rasjid tentang pengembalian daerah Sumatera Barat menurut Perjanjian Renville, 28 Oktober 1949.

Sumber: ANRI, Delegasi Indonesia No. 958

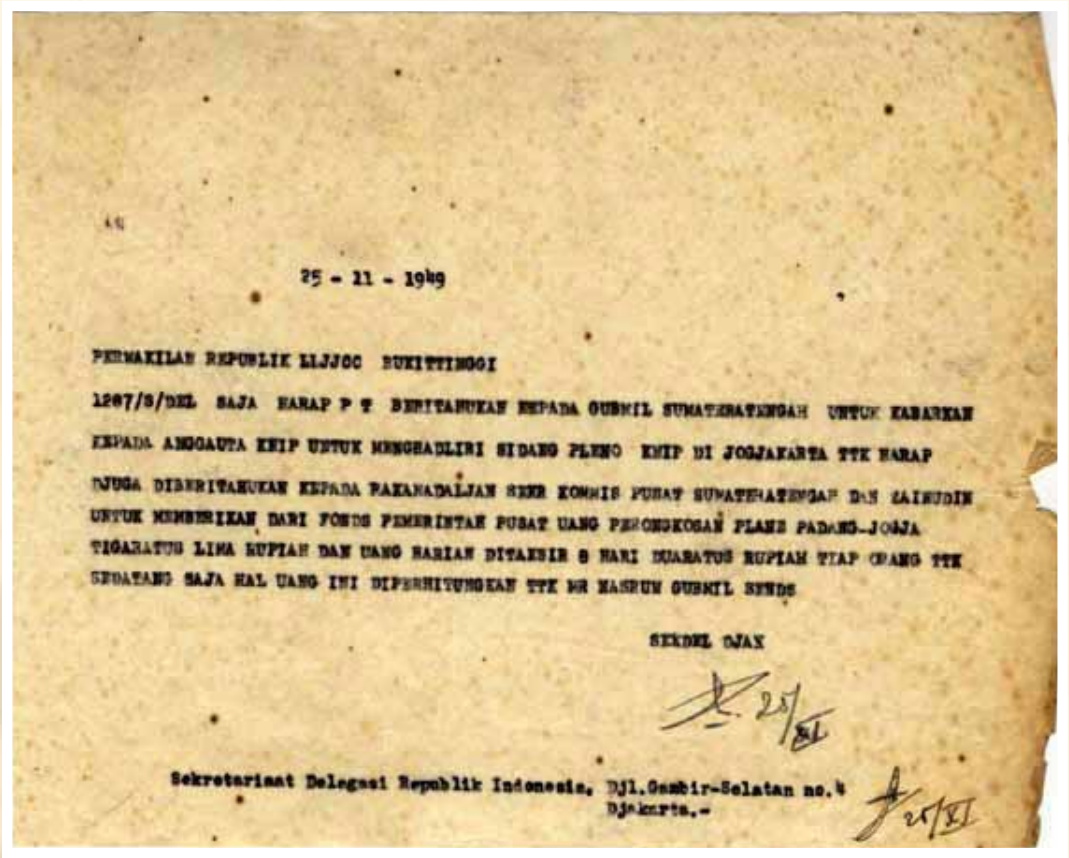

25 - 11 - 1949

PERWAKILAN REPUBLIK LIJJOC BUKITTINGGI

1267/S/DEL SAJA HARAP P T BERITAHUKAN KEPADA GUBMIL SUMATERATENGAH UNTUK KABARKAN KEPADA ANGGAUTA KNIP UNTUK MENGHADLIRI SIDANG PLENO KNIP DI JOGJAKARTA TTK HARAP DJUGA DIBERITAHUKAN KEPADA PARANADALJAN SEKR KOMMIS PUSAT SUMATERATENGAH DAN ZAINUDIN UNTUK MENBERIKAN DARI FONDS PEMERINTAH PUSAT UANG PERCONGKOSAN PLANE PADANG-JOGJA TIGARATUS LIMA RUPIAH DAN UANG HARIAN DITAKSIR 8 HARI DUARATUS RUPIAH TIAP ORANG TTK SEDATANG SAJA HAL UANG INI DIPERHITUNGKAN TTK MR MASRUM GUBMIL SENDS

SEKDEL DJAX

25/XI

Sekretariaat Delegasi Republik Indonesia, Djl.Gambir-Selatan no.4
Djakarta.-

25/XI

Telegram dari Sekretariat Delegasi Indonesia Jakarta kepada Local Joint Committee Bukittinggi tentang sidang pleno Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) di Jogyakarta, 25 Nopember 1949.

Sumber: ANRI, Delegasi Indonesia No. 1129

Semboyan yang ditulis di Tugu Kemerdekaan di Bukittinggi,
26 Agustus 1950,
Sumber: ANRI, Kempen 50661

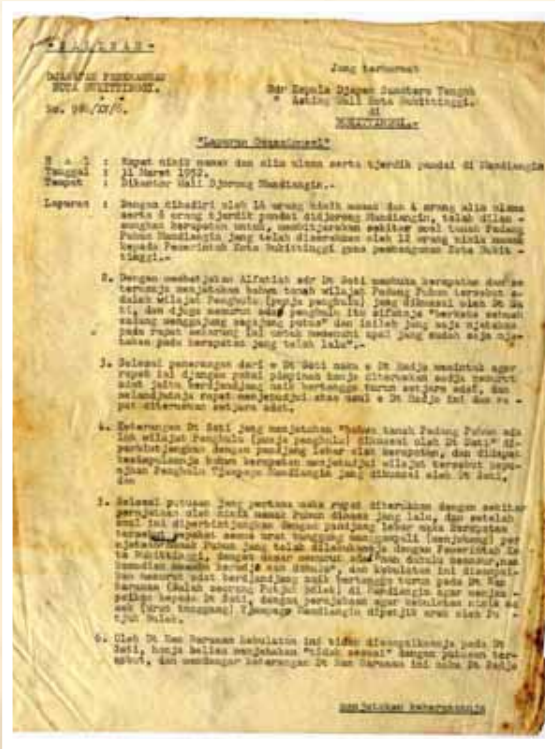

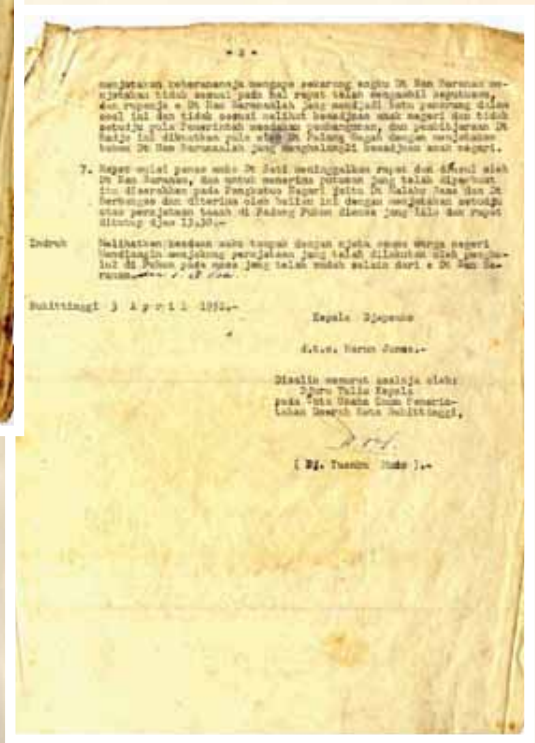

Salinan Laporan Kepala Jawatan Penerangan Kota Bukittinggi kepada Kepala Jawatan Penerangan Sumatera Tengah dan *Acting* Walikota Bukittinggi tentang hasil rapat 31 Maret 1952 membicarakan tanah Padang Puhun Mandiangin yang telah diserahkan kepada Pemerintah Kota Bukittinggi guna pembangunan kota Bukittinggi, 3 April 1952.
Sumber: ANRI, Kabinet Presiden No. 847

Wakil Presiden Moh. Hatta sedang menyaksikan pameran TRI Divisi IX di Bukittinggi, 1954.
Sumber: ANRI, Kempen 80706 CC 135

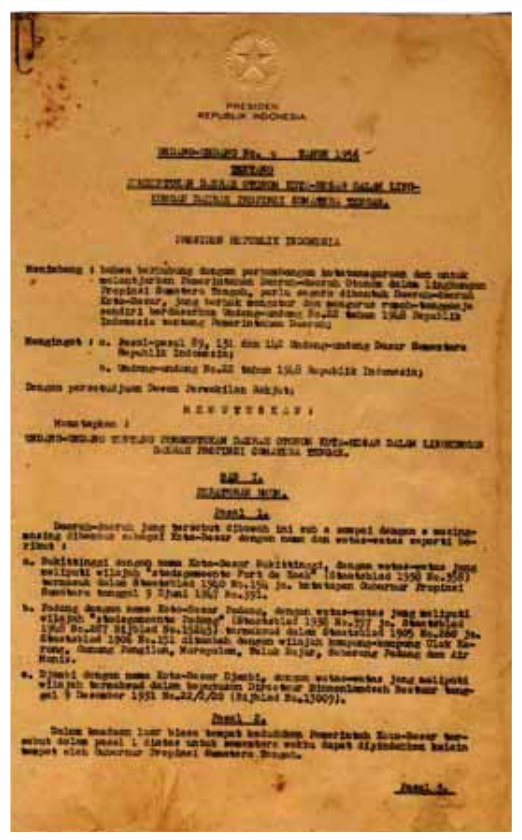

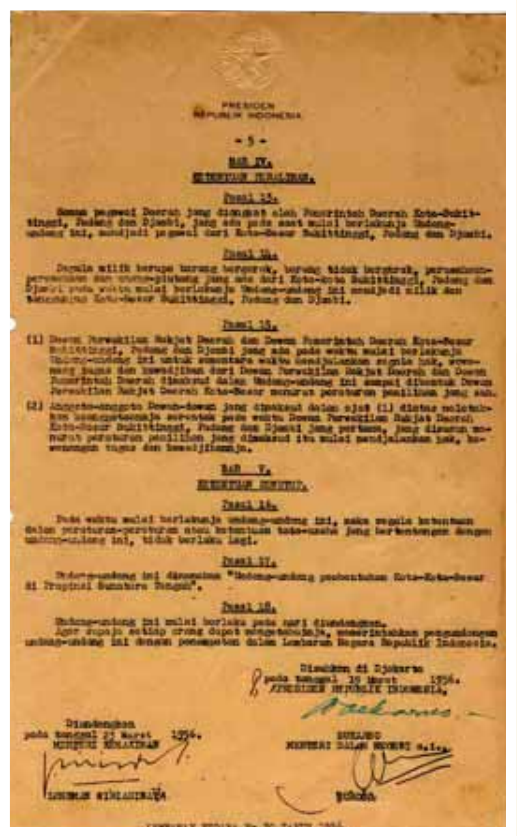

Halaman awal dan akhir Undang-Undang No. 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah, 19 Maret 1956.
Sumber: ANRI, Sekkab UU No. 185

Mohammad Hatta, lahir di Bukittinggi, 12 Agustus 1902
Proklamator Kemerdekaan RI, Wakil Presiden Republik Indonesia
pertama dan Bapak Koperasi Indonesia, 19 September 1953.
Sumber: ANRI, Kempen 530919 FG 2-10

Haji Agus Salim, lahir di Bukittinggi, 8 Oktober 1884, Pemimpin Serikat Islam dan mantan Menteri Muda Luar Negeri pada Kabinet Syahrir II, 24 Maret 1964.
Sumber: ANRI, Kempen 64-2645

PENDIDIKAN

Kemajuan perkembangan pendidikan di Fort de Kock menjadi sangat penting, dimulai dengan didirikannya Sekolah Guru Kweekschool voor Inlandsche Onderwijzers, bagi penduduk setempat pada tahun 1856. Pendidikan bagi para pamong atau Opleiding School voor Inlandsche Ambtenaren (OSVIA) pun dibuka sebelum berdirinya Sekolah Pendidikan Menengah atau Meer Uitgebreid Lager Onderwijs (MULO) di awal abad ke 20.

Pasca Kemerdekaan kegiatan Siswi-siswi di Sekolah Guru dan Hakim Agama di Bukittinggi sama seperti Sekolah Umum lainnya membuktikan pentingnya pembangunan pendidikan di Bukittinggi yang lebih mengedepankan pendidikan berlandaskan agama.

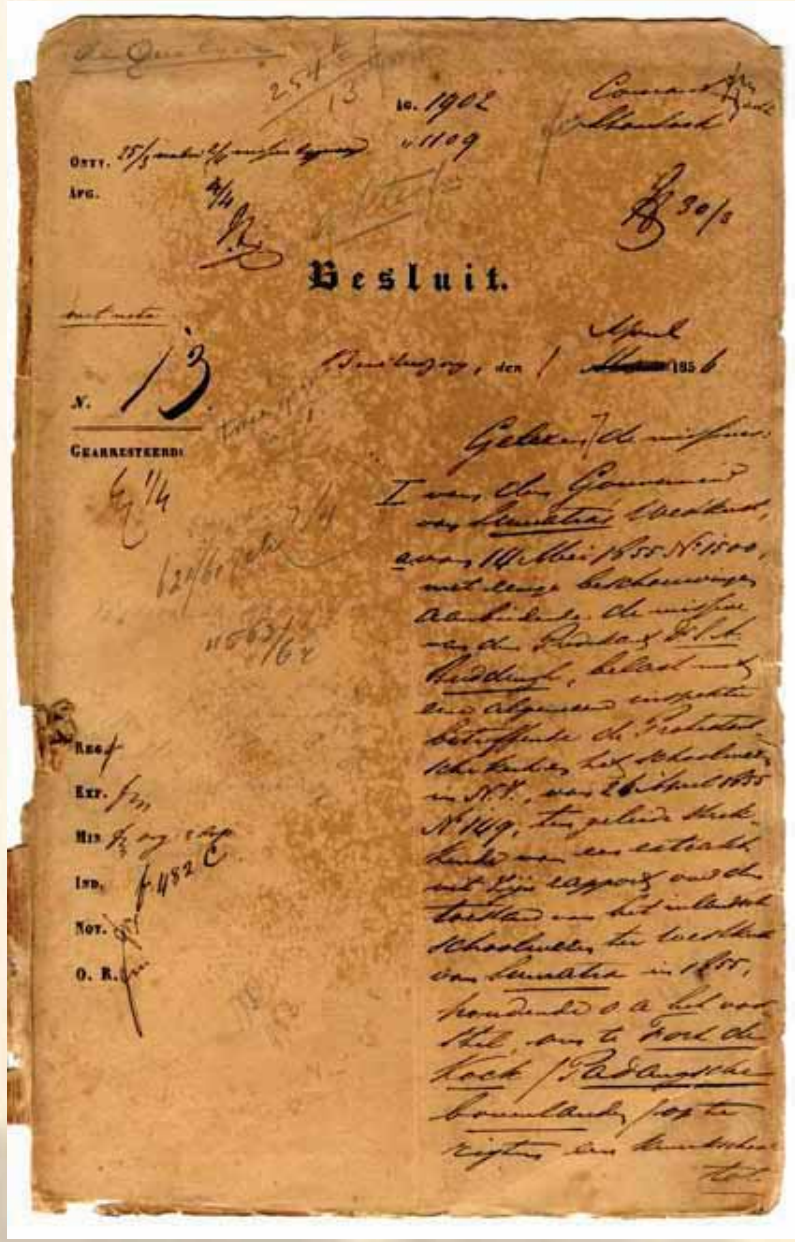

Besluit.

N. 13

Pragmen Surat Keputusan Gubernur Jenderal No 13 Tahun 1856 tentang pendirian Sekolah Guru "Kweekschool" bagi kaum Bumi Putra di Fort de Kock (Padangshe Bovenlanden sekarang Bukittinggi), 1 April 1856.

Sumber: ANRI, Besluit 1 April 1856 No. 13

PER VLIEGPOST.-

Fort de Kock, den 30sten December 1938

No. 782/D.-

Onderwerp: Herberekening van de kosten van de overdracht van onderwijs- en volksgezondheidstaak aan stadsgemeenten in de Buitengewesten.---------

Met referte aan Uw schrijven, gericht aan den Gouverneur van Sumatra ddo.8 December 1938 No.Dec 7/27/1, heb ik de eer UHoogEdelGestrenge het volgende beleefd mede te deelen, aangaande de Herberekening van de kosten van de overdracht van Onderwijs- en Volksgezondheidstaak aan de Stadsgemeenten in de Buitengewesten.-

I. Dienst der Volksgezondheid.-

Ten aanzien van de personeele uitgaven is slechts opgebracht een Gouvernements vroedvrouw le klasse met een bezoldiging inclusief overgangsbezoldiging, regionale- en duurtetoeslagen van f 641.- 's jaars.-

Geen rekening is gehouden met het ondervolgende:

Sinds 1 Juli 1938 is aan de Stadsgemeente overgedragen een mantriverpleger le klasse met een

bezoldiging van	f 55.-	
overgangsbezoldiging	" 9,13	
kindertoelage	" 11.54	
standsplaatstoelage	" 7.15	
Bijkomende personeelskosten voor ter beschikking gesteld landspersoneel 15 % van f 64.13	" 9.68	
Per jaar 12 x	f 92.44	.... f 1109.28

Reeds voor 1 Juli 1938 werd door de Gemeente aan den Dienst der Volksgezondheid vergoed de bezoldiging van den hoofdmantriverpleger ad f 78.38 inclusief overgangsbezoldiging. In verband met de overdracht op 1 Juli 1938 werd van de Stadsgemeente bovendien gevorderd de 15 % bijdrage voor ter beschikking gesteld landspersoneel ad f 11.75 per maand of per jaar ..... " 141.-

welk bedrag aan de Gemeente dient te worden vergoed.

De bijdrage aan de Gemeente dient dus te worden verhoogd met ..... f 1250.28

en gesteld op f 2031.28.

II. Onderwijs.-

Ten aanzien van het Onderwijs zijn geen aanmerkingen.-

De fd. Burgemeester der Stadsgemeente F.d.Kock,

w.g. Onleesbaar.

A a n

den Directeur van Binnenlandsch Bestuur

te Batavia-Centrum.-

Doordruk verleend aan :

Resident van Sumatra's Westkust en

Gouverneur van Sumatra te Medan.-

Batavia-C., 16 Januari 1939.

Voor eensluidend afschrift:

Salinan Surat Walikota Fort de Kock kepada Direktur Binnenlansch Bestuur tentang Penghitungan penyerahan anggaran pendidikan dan kesehatan penduduk di luar daerah kepada kotapraja, 30 Desember 1938.

Sumber: ANRI, Binnenlandsch Bestuur No. 1523

Para siswa Sekolah Guru dan Hakim Agama bagian C di Bukittinggi sedang bermain tenis meja di ruang senam, 14 November 1952.

Sumber: ANRI, Kempen 521114 CC 3

Para siswa sedang membaca di Perpustakaan Sekolah Guru dan Hakim Agama bagian C di Bukittinggi, 14 November 1952.
Sumber: ANRI, Kempen 521114 CC 5

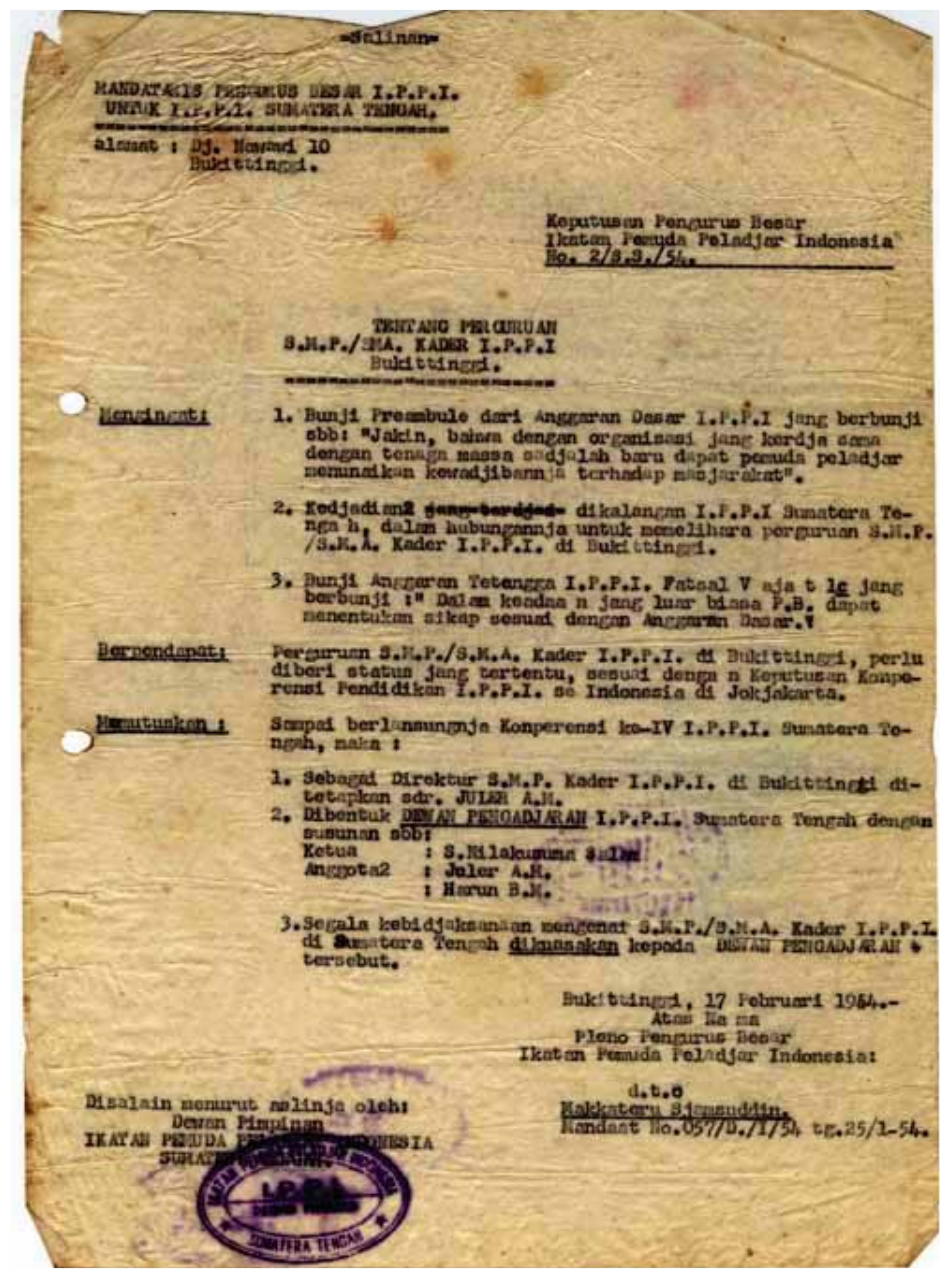

-Salinan-

MANDATARIS PENGURUS BESAR I.P.P.I.
UNTUK I.P.P.I. SUMATERA TENGAH,
Alamat : Dj. Nasmi 10
Bukittinggi.

Keputusan Pengurus Besar
Ikatan Pemuda Peladjar Indonesia
No. 2/S.S./54.

TENTANG PERGURUAN
S.M.P./SMA. KADER I.P.P.I
Bukittinggi.

Mengingati 1. Bunji Preambule dari Anggaran Dasar I.P.P.I jang berbunji sbb: "Jakin, bahwa dengan organisasi jang kerdja sama dengan tenaga massa sadjalah baru dapat pemuda peladjar menunaikan kewadjibannja terhadap masjarakat".

2. Kedjadian2 ~~jang terdjadi~~ dikalangan I.P.P.I Sumatera Tengah, dalam hubungannja untuk memelihara perguruan S.M.P./S.M.A. Kader I.P.P.I. di Bukittinggi.

3. Bunji Anggaran Tetangga I.P.P.I. Fatsal V ayat 1e jang berbunji :" Dalam keadaan n jang luar biasa P.B. dapat menentukan sikap sesuai dengan Anggaran Dasar."

Bernendapat: Perguruan S.M.P./S.M.A. Kader I.P.P.I. di Bukittinggi, perlu diberi status jang tertentu, sesuai dengan Keputusan Konperensi Pendidikan I.P.P.I. se Indonesia di Jokjakarta.

Memutuskan : Sampai berlangsungnja Konperensi ke-IV I.P.P.I. Sumatera Tengah, maka :

1. Sebagai Direktur S.M.P. Kader I.P.P.I. di Bukittinggi ditetapkan sdr. JULER A.M.
2. Dibentuk DEWAN PENGADJARAN I.P.P.I. Sumatera Tengah dengan susunan sbb:
   Ketua : S.Nilakusuma S.H.
   Anggota2 : Juler A.M.
   : Harun B.M.
3. Segala kebidjaksanaan mengenai S.M.P./S.M.A. Kader I.P.P.I. di Sumatera Tengah dikuasakan kepada DEWAN PENGADJARAN tersebut.

Bukittinggi, 17 Februari 1954.-
Atas Nama
Pleno Pengurus Besar
Ikatan Pemuda Peladjar Indonesia:

d.t.o
Nakkateru Sjamsuddin.
Mandat No.057/D./I/54 tg.25/1-54.

Disalain menurut salinja oleh:
Dewan Pimpinan
IKATAN PEMUDA PELADJAR INDONESIA
SUMATERA TENGAH.

Keputusan Pengurus Besar Ikatan Pemuda Pelajar Indonesia (PB I.P.P.I) no. 2/S.S./54 tentang Perguruan SMP/SMA Kader Ikatan Pemuda Pelajar Indonesia Bukittinggi mengenai ditetapkan sdr. Juler A.M. sebagai Direktur SMP Kader Ikatan Pemuda Pelajar Indonesia, 17 Februari 1954.

Sumber: ANRI, I.P.P.I No. 255

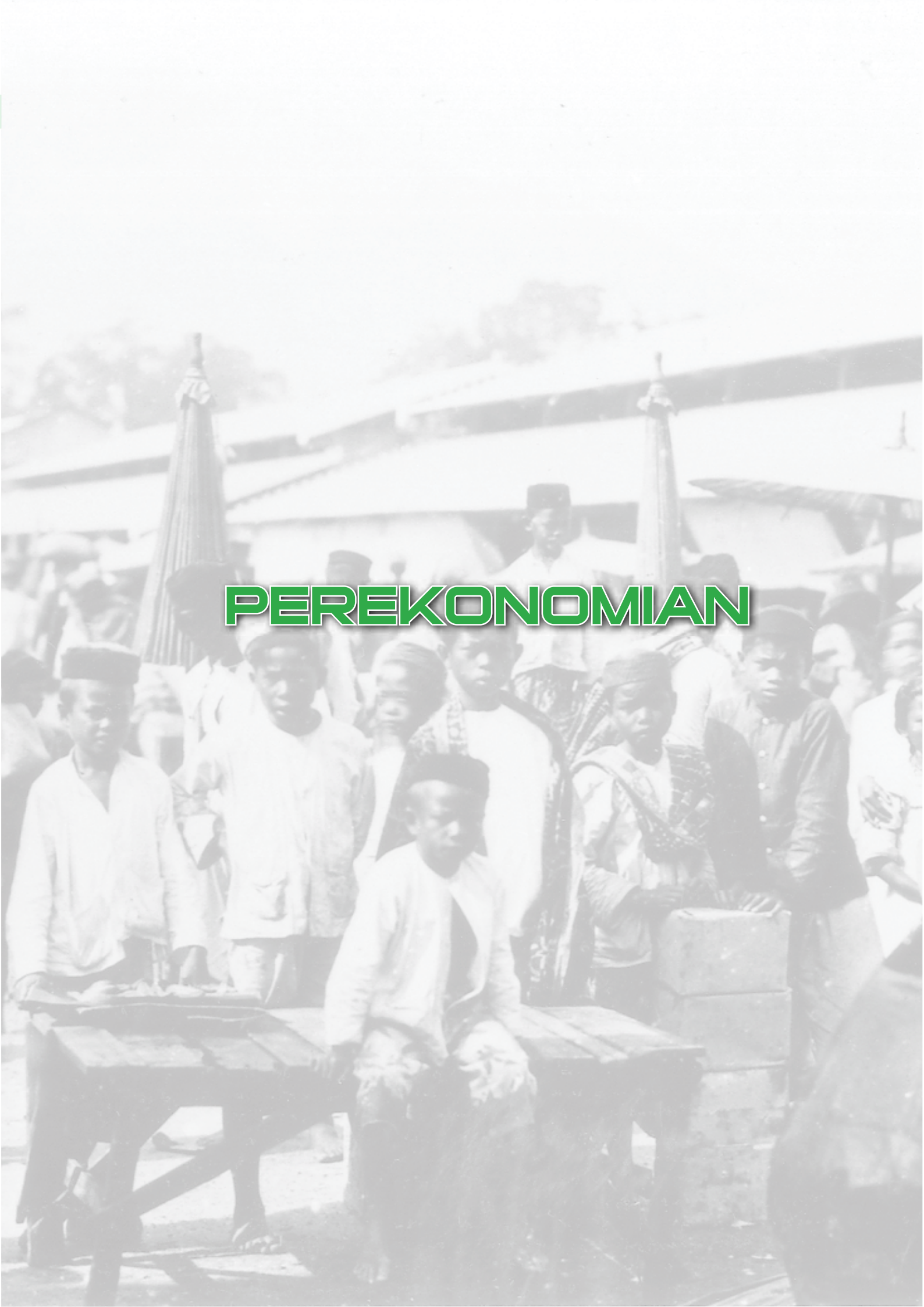

PEREKONOMIAN

Kota kecil yang semula terdiri dari 5 kampung kecil yang membentuk pusat perdagangan (pasar) bagi masyarakat Agam Tuo (Oud Agam). Aktifitas perekonomian yang bermuara di Pasar yang terletak di jantung Kota Bukittinggi, memperlihatkan gerak roda perekonomian masyarakat sekitar. Tambak ikan merupakan kegiatan perdagangan yang sangat hidup. Posisi yang strategis Kota Bukittinggi turut berpengaruh pada perkembangan perekonomian, disamping pemberian kredit untuk Pembangunan Masyarakat Desa oleh Pemerintah.

Toko Agam dan pertokoan di Lubuk Agam,
Fort de Kock, Sumatera Barat, [1930].
Sumber: ANRI, KIT Sumbar 1098/4

Tambak ikan keramat didepan rumah di Kampung Teluk, Fort de Kock, Sumatera Barat, [1930].
Sumber: ANRI, KIT Sumbar 140/47

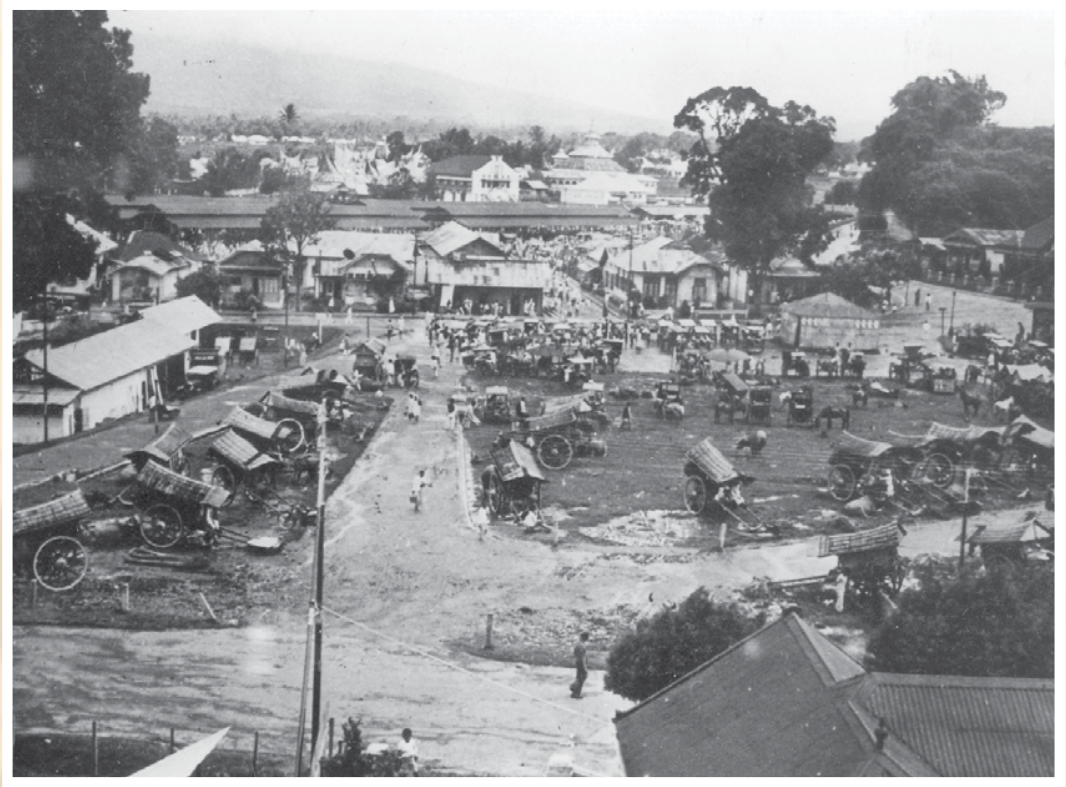

Gerobak-gerobak pedati di depan pasar, Fort de Kock, Sumatera Barat, [1930].
Sumber: ANRI, KIT Sumbar 364-32

Anak-anak di keramaian pasar (pekan) di Fort de Kock, Sumatera Barat, [1930].
Sumber: ANRI, KIT Sumbar 364-48

Buruh sedang menguliti pohon cassia di Fort de Kock, Sumatera Barat, [1930]
Sumber: ANRI, KIT Sumbar 621-24

Kerbau dan pemiliknya di Fort de Kock,
Sumatera Barat,[1930]
Sumber: ANRI, KIT Sumbar 674-2

Pengangkutan sayur dengan menggunakan gerobak disekitar Pasar Bukittinggi, 21 April 1953.
Sumber: ANRI, Kempen 530421 CC 2 -10

Penjual Sate dan para pengemudi bendi (delman) disekitar Pasar Bukittinggi, 21 April 1953.
Sumber: ANRI, Kempen 530421 CC 2-6

Wakil Presiden Moh. Hatta mengunjungi perkampungan Bukittinggi, 1954.
Sumber: ANRI, Kempen K80706 CC100

Pemandangan di dekat Pasar dengan orang-orang pergi berbelanja, 1955.
Sumber: ANRI, Kempen Sumbar 551204 CC 6

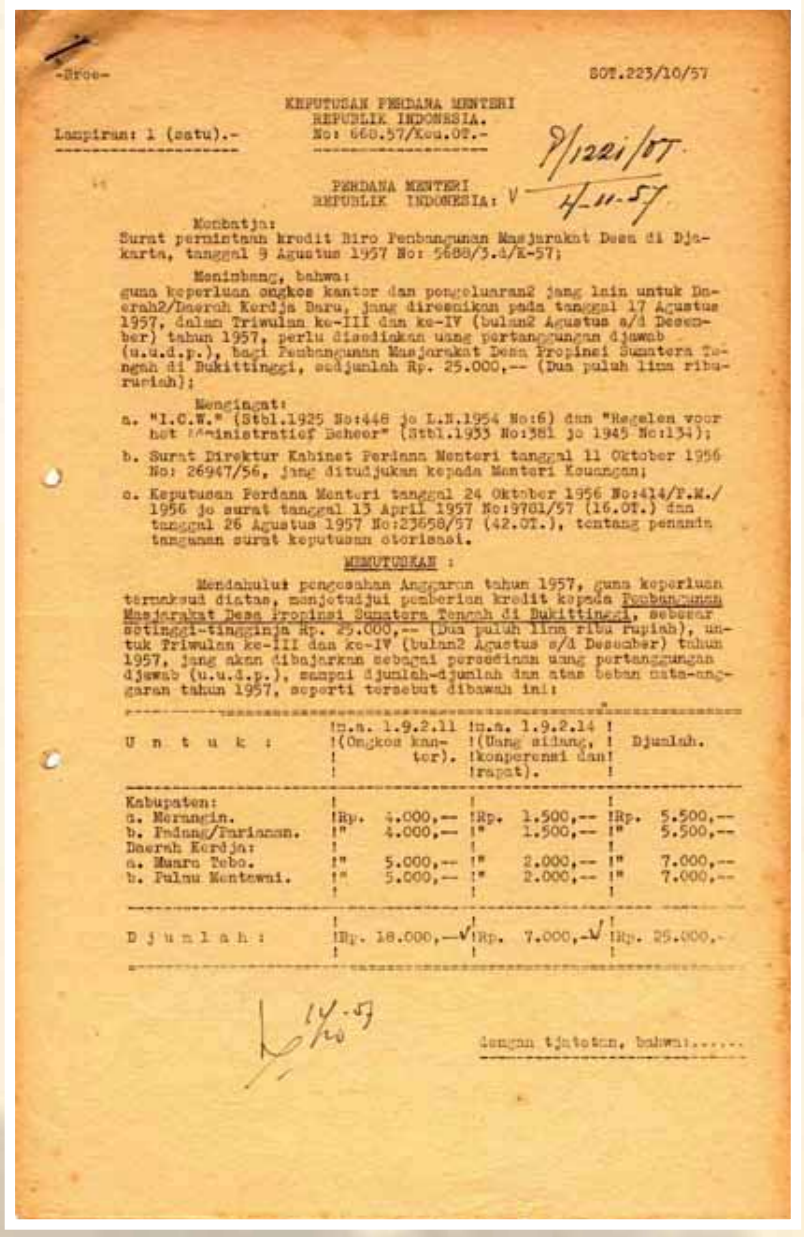

-Proe-

SOT.223/10/57

KEPUTUSAN PERDANA MENTERI
REPUBLIK INDONESIA.
No: 668.57/Keu.OT.-

Lampiran: 1 (satu).-

PERDANA MENTERI
REPUBLIK INDONESIA:

Menbatja:
Surat permintaan kredit Biro Pembangunan Masjarakat Desa di Djakarta, tanggal 9 Agustus 1957 No: 5688/3.a/K-57;

Menimbang, bahwa:
guna keperluan ongkos kantor dan pengeluaran2 jang lain untuk Daerah2/Daerah Kerdja Baru, jang diresmikan pada tanggal 17 Agustus 1957, dalam Triwulan ke-III dan ke-IV (bulan2 Agustus s/d Desember) tahun 1957, perlu disediakan uang pertanggungan djawab (u.u.d.p.), bagi Pembangunan Masjarakat Desa Propinsi Sumatera Tengah di Bukittinggi, sedjumlah Rp. 25.000,-- (Dua puluh lima ribu rupiah);

Mengingat:
a. "I.C.W." (Stbl.1925 No:448 jo L.N.1954 No:6) dan "Regelen voor het Administratief Beheer" (Stbl.1933 No:381 jo 1945 No:134);
b. Surat Direktur Kabinet Perdana Menteri tanggal 11 Oktober 1956 No: 26947/56, jang ditudjukan kepada Menteri Keuangan;
c. Keputusan Perdana Menteri tanggal 24 Oktober 1956 No:414/P.M./1956 jo surat tanggal 13 April 1957 No:9701/57 (16.OT.) dan tanggal 26 Agustus 1957 No:23658/57 (42.OT.), tentang penandatanganan surat keputusan otorisasi.

MENUTUSKAN :

Mendahului pengesahan Anggaran tahun 1957, guna keperluan termaksud diatas, menjetudjui pemberian kredit kepada Pembangunan Masjarakat Desa Propinsi Sumatera Tengah di Bukittinggi, sebesar setinggi-tingginja Rp. 25.000,-- (Dua puluh lima ribu rupiah), untuk Triwulan ke-III dan ke-IV (bulan2 Agustus s/d Desember) tahun 1957, jang akan dibajarkan sebagai persediaan uang pertanggungan djawab (u.u.d.p.), sampai djumlah-djumlah dan atas beban mata-anggaran tahun 1957, seperti tersebut dibawah ini:

U n t u k :	m.a. 1.9.2.11 (Ongkos kantor).	m.a. 1.9.2.14 (Uang sidang, konferensi dan rapat).	Djumlah.
Kabupaten:			
a. Meranggin.	Rp. 4.000,--	Rp. 1.500,--	Rp. 5.500,--
b. Padang/Pariaman.	" 4.000,--	" 1.500,--	" 5.500,--
Daerah Kerdja:			
a. Muara Tebo.	" 5.000,--	" 2.000,--	" 7.000,--
b. Pulau Mentawai.	" 5.000,--	" 2.000,--	" 7.000,--
D j u m l a h :	Rp. 18.000,--	Rp. 7.000,--	Rp. 25.000,-

dengan tjatatan, bahwa:.....

Surat Keputusan Perdana Menteri RI (Kabinet Perdana Menteri Juanda) No. 668.57/Keu. OT tentang persetujuan pemberian kredit kepada Pembangunan Masyarakat Desa Propinsi Sumatera Tengah di Bukittinggi, 24 Oktober 1957.
Sumber: ANRI, Perdana Menteri Republik Indonesia No. 533.

TRANSPORTASI

Delman sebagai alat transportasi di Fort de Kock, 1930.
Sumber: ANRI, KIT Sumbar 175-88

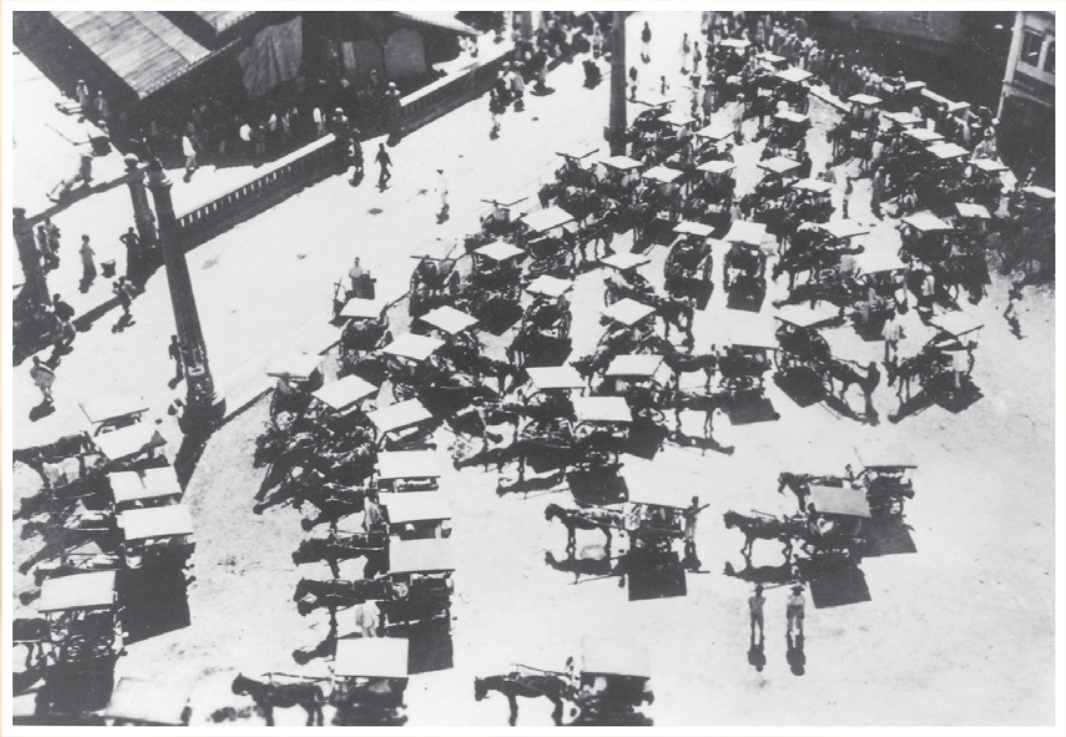

Delman-delman di "Pasar Minggu" menunggu penumpang ,
Fort de Kock, Sumatera Barat, [1930].
Sumber: ANRI, KIT Sumbar 697-38

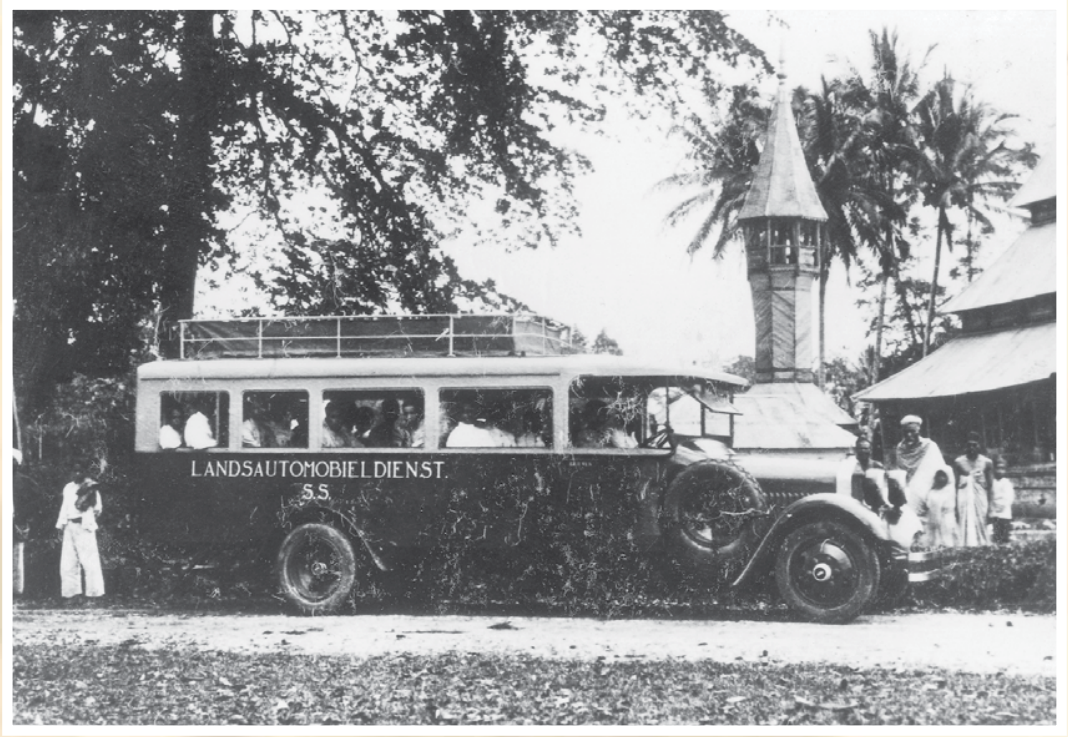

Autobus sebagai alat transportasi di Fort de Kock, Sumatera Barat, 1930.
Sumber: ANRI, KIT Sumbar 698-8

INFRASTRUKTUR

Pembangunan telah dimulai saat Fort de Kock membangun loji untuk melayanani para pegawai dan gudang penyimpanan Rumah Sakit (Bangsal khusus Wanita) pada tahun 1863.

Sebagai Pusat Pemerintahan, Kota Bukittinggi tertata secara apik, khas Pemerintahan Kolonial, seperti suasana sekitar rumah Residen. Dibangunnya Jam Gadang, jam diatas menara yang terletak di jantung Kota Bukittinggi juga mewarnai tatakota, dikenal sebagai salah satu lambang kota.

Berdirinya Tugu Kemerdekaan Republik Indonesia, menandakan bahwa Kota Bukittinggi pernah menjadi Ibukota PDRI Pasca Kemerdekaan. Pemandangan di sepanjang jalur kereta api ke Bukittinggi, memiliki bentuk yang mencerminkan kekhasan budaya Minang pada setiap bangunannya.

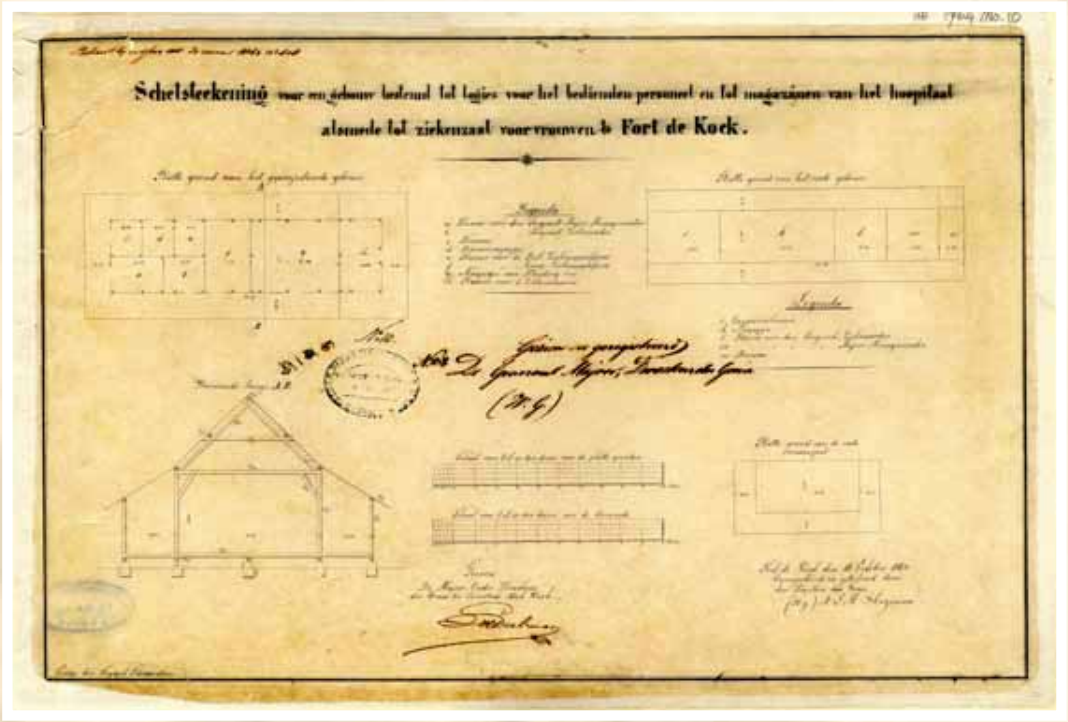

Sketsa bangunan loji untuk melayani pegawai-pegawai dan gudang penyimpanan rumah sakit (bangsal wanita) di Fort de Kock, 1863.

Sumber: ANRI, HB 1764 No.10

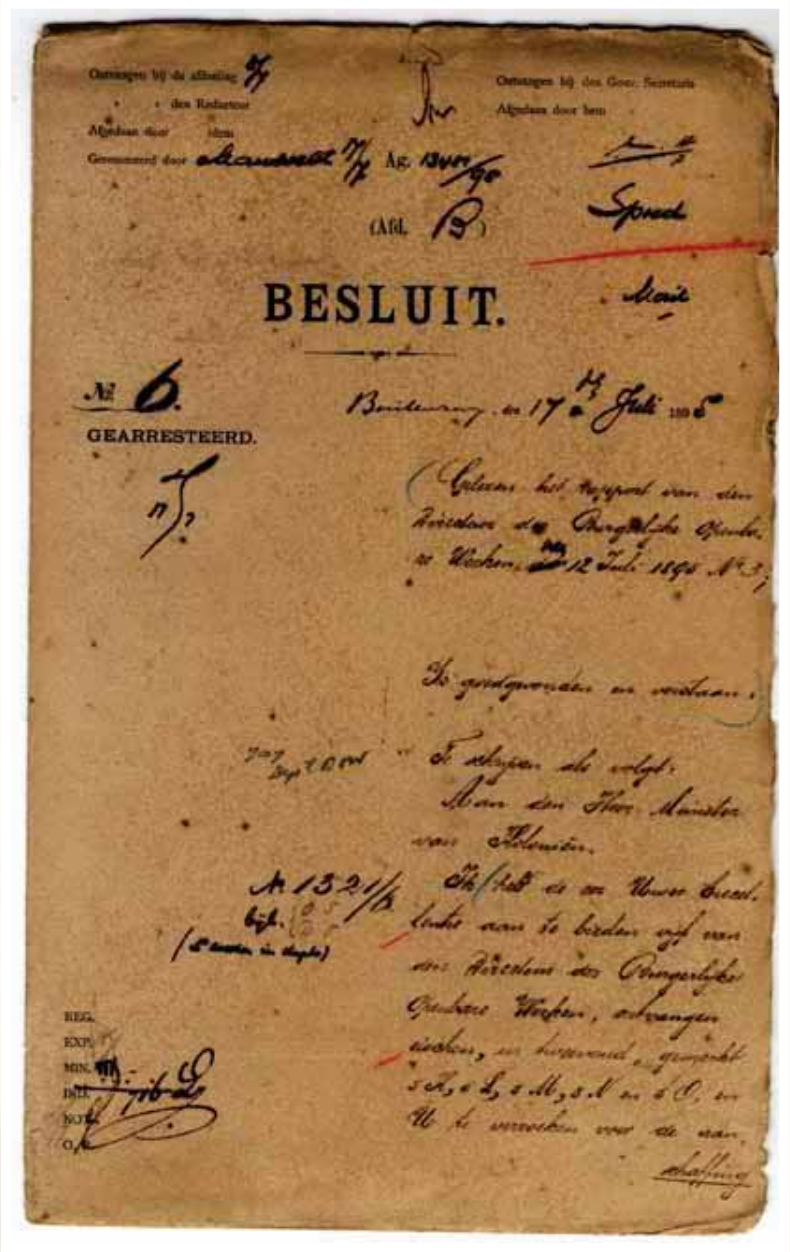

BESLUIT.

№ 6.

GEARRESTEERD.

Fragmen Surat Keputusan Gubernur Jenderal tentang permohonan peralatan dari Eropa bagi perluasan jalur kereta Fort de Kock Bukittinggi, 17 Juli 1845.

Sumber: ANRI, Besluit 17 Juli 1895 No.6

Jalan di perumahan, Fort de Kock,
Sumatera Barat, [1921].
Sumber: ANRI, KIT Sumbar 1098-6

Salah satu sudut kota di Fort de Kock,
Sumatera Barat, [1930]
Sumber: ANRI, KIT Sumbar 754-73

Panorama daerah tempat peristirahatan di Fort de Kock, Sumatera Barat, [1930]
Sumber: ANRI, KIT Sumbar 168-26

Kampung di Fort de Kock,
Sumatera Barat, [1930].
Sumber: ANRI, KIT Sumbar 175-86.

Jembatan di celah *kerbauwen* Fort de Kock,
Sumatera Barat, [1930].
Sumber: ANRI, KIT Sumbar 180-64

Panorama di areal Benteng Fort de Kock,
Sumatera Barat, [1930]
Sumber: ANRI, KIT Sumbar 255-70

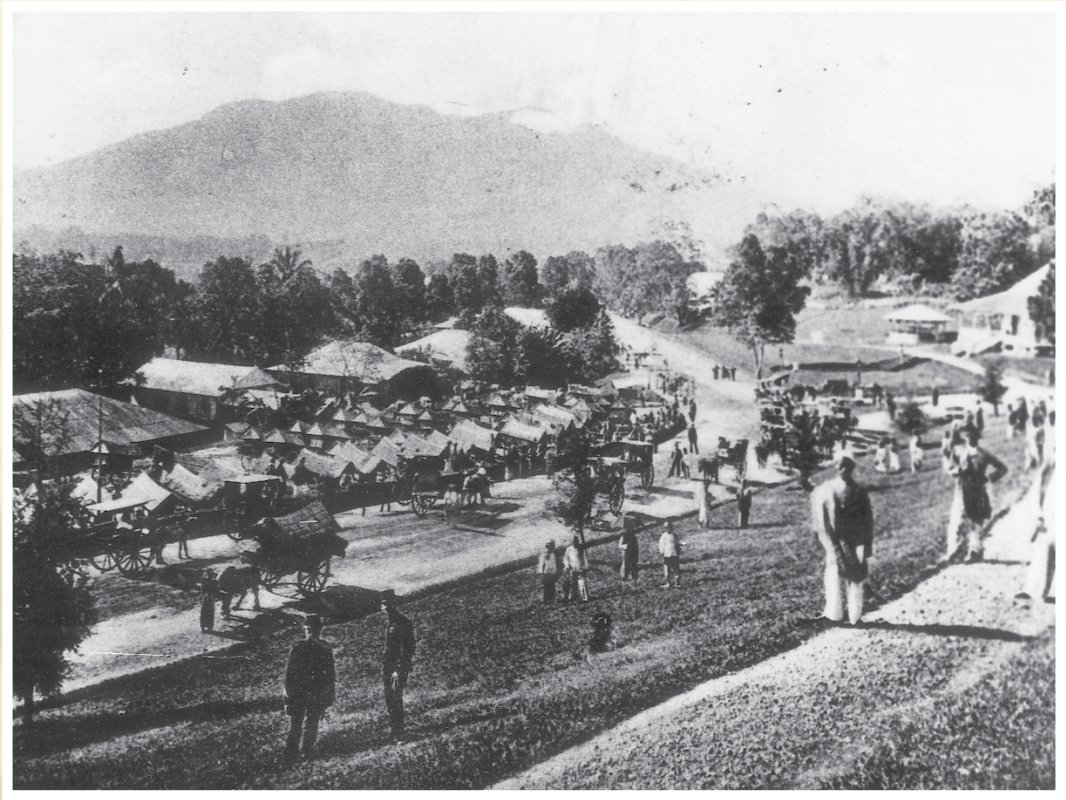

Jalan raya di Fort de Kock dengan latar belakang Gunung Marapi, Sumatera Barat, [1930]

Sumber: ANRI, KIT Sumbar 52-80

Desa di celah *kerbauwen* di Fort de Kock, Sumatera Barat, [1930].
Sumber: ANRI, KIT Sumbar 52-84

Kampung Taluk di Fort de Kock,
Sumatera Barat, [1930].
Sumber: ANRI, KIT Sumbar 76-54

Rumah Direktur Kweekschool di Fort de Kock,
Sumatera Barat, [1930]
Sumber: ANRI, KIT Sumbar 825-51

Komplek perumahan tentara di Fort de Kock,
Sumatera Barat, [1930]
Sumber: ANRI, KIT Sumbar 827-49

Komplek perumahan tentara di Fort de Kock,
Sumatera Barat, [1930]
Sumber: ANRI, KIT Sumbar 827-51

Rumah di Fort de Kock,
Sumatera Barat, [1930]
Sumber: ANRI, KIT Sumbar 845-1

Kampung di Fort de Kock di latar belakang kantor pos, Sumatera Barat, [1930]
Sumber: ANRI, KIT Sumbar 846-69

Balai pertemuan di Fort de Kock,
Sumatera Barat, [1930].
Sumber: ANRI, KIT 176-60

Jam Gadang di Fort de Kock dengan latar belakang Kantor Pos, Sumatera Barat, [1930].
Sumber: ANRI, KIT Sumbar 754-76

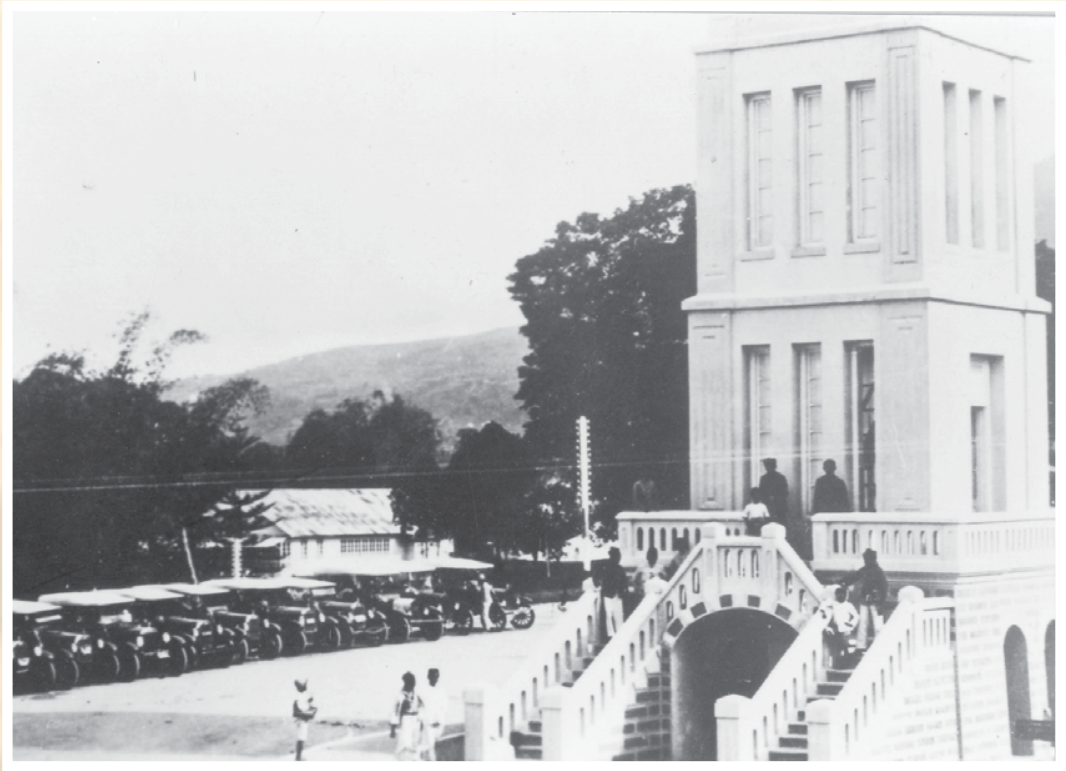

Menara monumen masuk pasar, Fort de Kock, Sumatera Barat, [1930].
Sumber: ANRI, KIT Sumbar 755-79

Jam di tengah kota Fort de Kock, Sumatera Barat, [1930].
Sumber: ANRI, KIT Sumbar 760-87

Tugu Katulistiwa di Fort de Kock,
Sumatera Barat, [1930]
Sumber: ANRI, KIT Sumbar 789-77

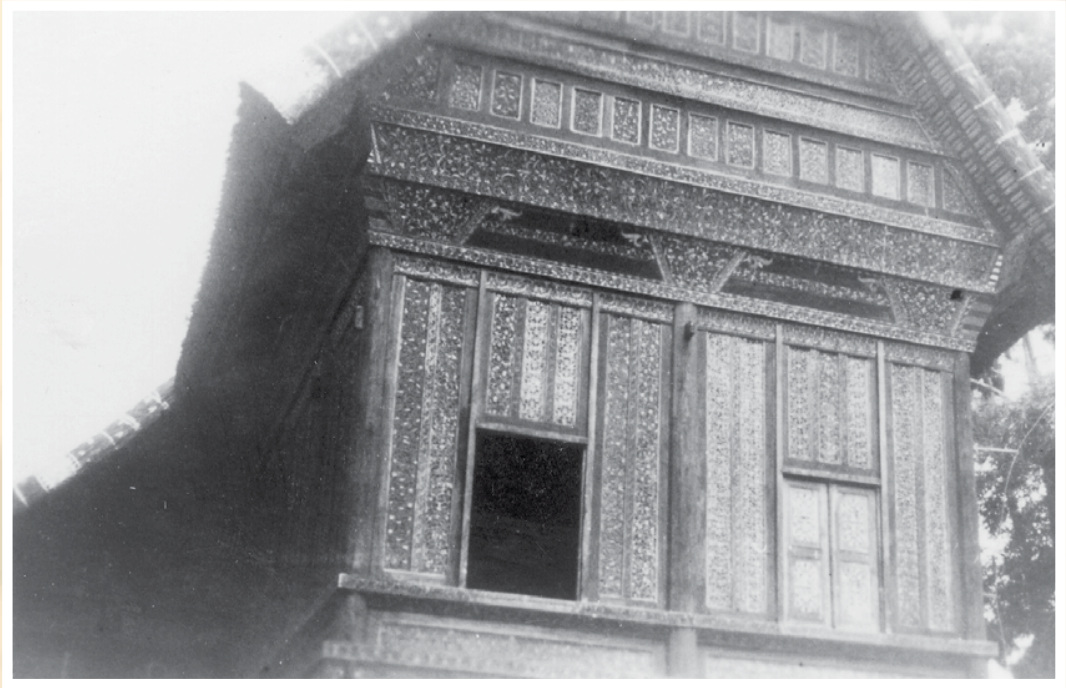

Rumah adat di Fort de Kock,
Sumatera Barat, [1930].
Sumber: ANRI, KIT Sumbar 846-11

Rumah adat dengan dinding berhias di Fort de Kock, Sumatera Barat, [1930].
Sumber: ANRI, KIT Sumbar 846-12

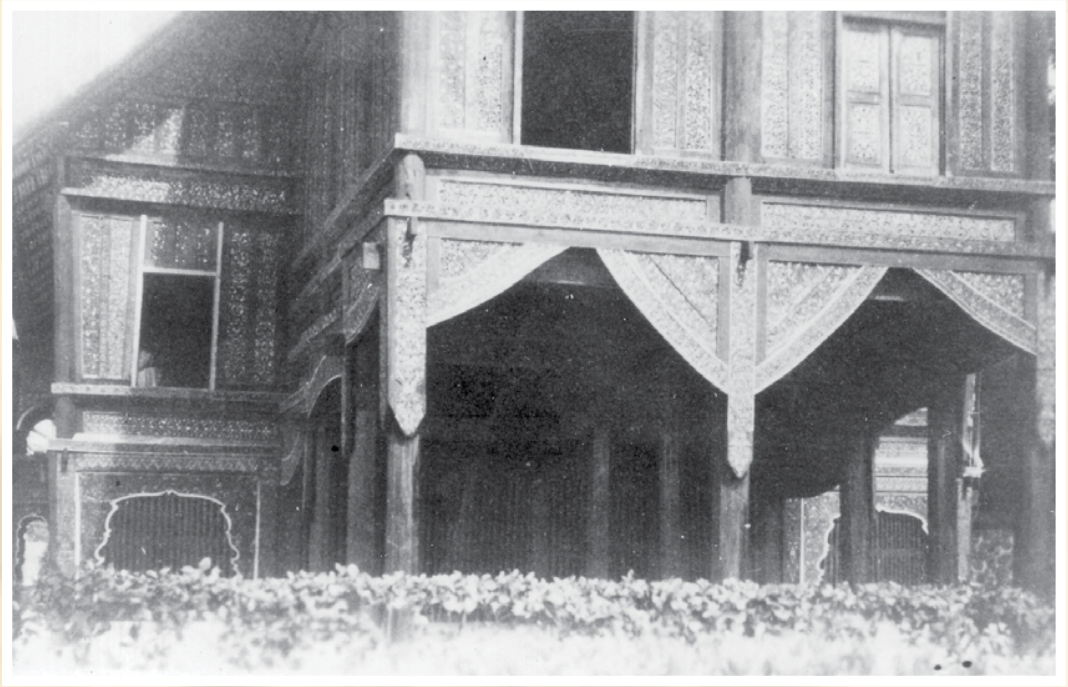

Rumah adat di Fort de Kock,
Sumatera Barat, [1930].
Sumber: ANRI, KIT Sumbar 846-9

Rumah dan lumbung padi di Kampung Kapau, Fort de Kock, Bukittinggi, Sumatera Barat, [1930]
Sumber: ANRI, KIT Sumbar 169-22

Museum Kebudayaan di Fort de Kock
[1940].
Sumber: ANRI, KIT 1101/046

Bekas rumah Residen di Fort de Kock
Sumatera Barat, [1940].
Sumber: ANRI, KIT 0775/071

Jam Gadang di Bukittinggi
21 April 1953.
Sumber: ANRI, Kempen K 530421 CC 2-2

Tugu Kemerdekaan Republik Indonesia di Bukittinggi,
27 April 1953.
Sumber: ANRI, Kempen K 530427 CC 1-1

Kantor Polisi Negara Pos Rao, Bukittinggi,
7 April 1954.
Sumber: ANRI, Kempen 540407 CC 4-1

Tugu Peringatan Kemerdekaan 17 Agustus di Taman Panorama Bukittinggi. Di belakang nampak Gunung Singgalang, 1955.
Sumber: ANRI, Kempen Sumbar 550915 cc 1-2

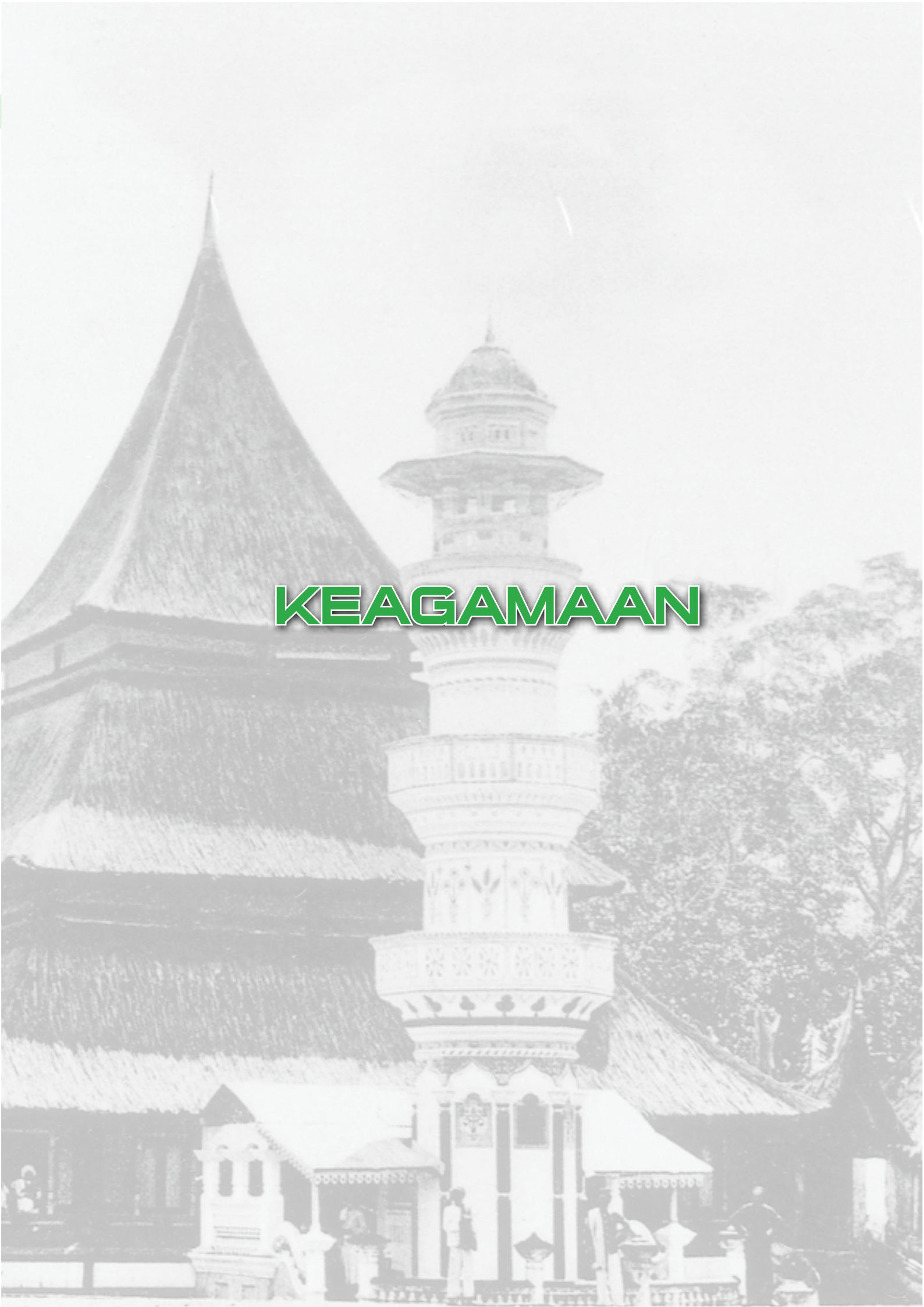

KEAGAMAAN

Pepatah Minang *"Adat basandi Syarak, Syarak basandi Kitabullah"* tercermin dengan jelas dalam keseharian masyarakat di Kota Bukittinggi, berbagai Mesjid sebagai tempat ibadah disetiap sudut kota. Pembangunan mesjid-mesjid yang berkembang sesuai jamannya, Sebelumnya keberadaan Surau sangat mendominasi dan selanjutnya dibangun lebih besar lagi seperti yang dikenal dengan Mesjid 1001 Malam dimana arsitekturnya terinspirasi oleh dongeng dari Negeri 1001 Malam.

Masjid di Sungai Taluk, Fort de Kock,
Sumatera Barat, 1918.
Sumber: ANRI, KIT 168/30

Menara Masjid Tahok di depan kolam, Fort de Kock, Sumatera Barat, [1930].
Sumber: ANRI, KIT Sumbar 1098/8

Masjid Raya di Fort de Kock,
Sumatera Barat, [1930]
Sumber: ANRI, KIT Sumbar 52/82, KIT Sumbar 75/82

Masjid tua dan lumbung padi di Fort de Kock,
Sumatera Barat, [1930].
Sumber: ANRI, KIT Sumbar 563/72

Masjid berbentuk bangunan adat di Fort de Kock, Sumatera Barat, [1930]
Sumber: ANRI, KIT SUmbar 75/84

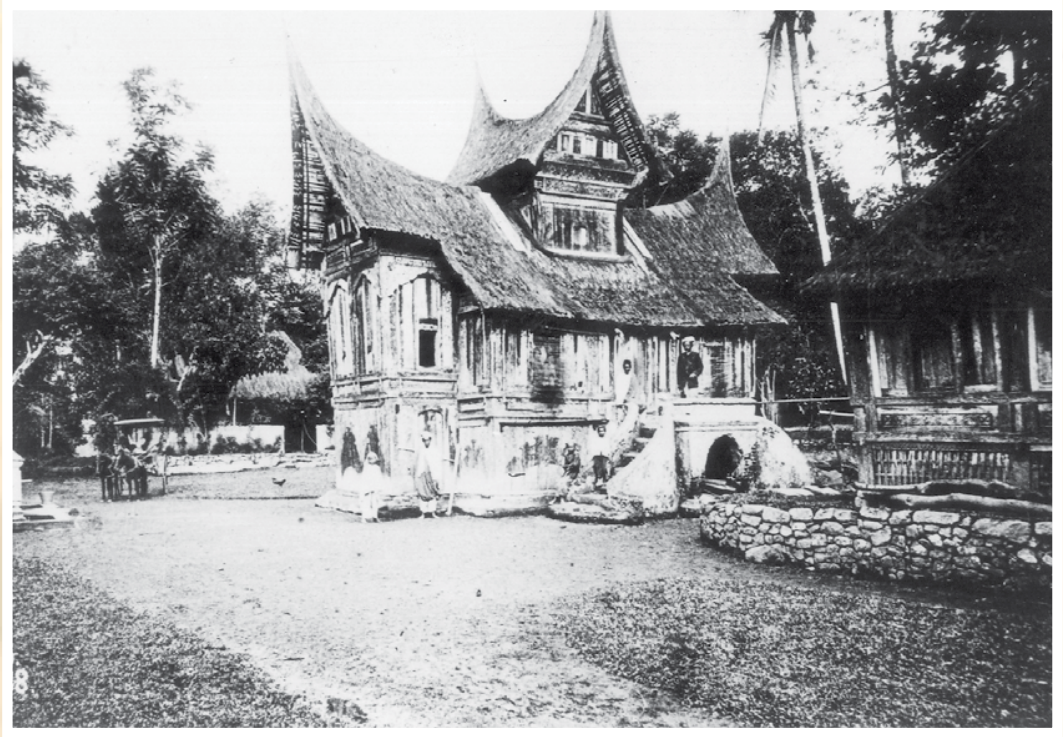

Surau dari abad 18 di Baso, Fort de Kock,
Sumatera Barat, [1930]
Sumber: ANRI, KIT Sumbar 804/6

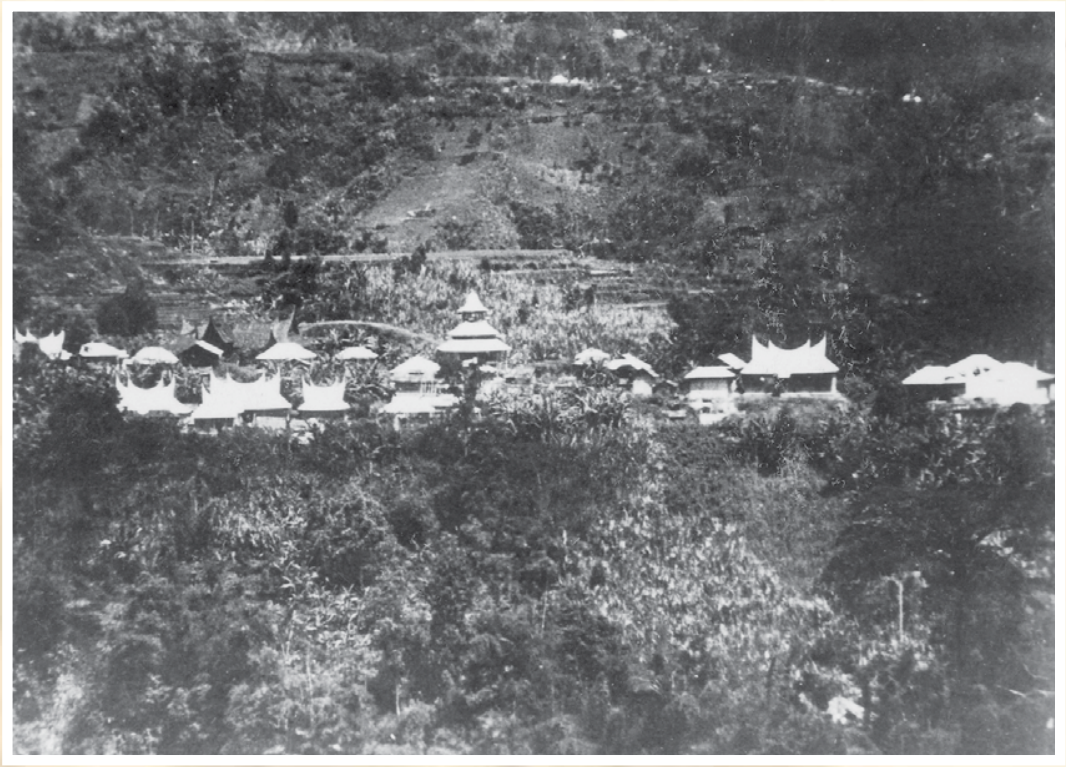

Masjid dan kampung di Fort de Kock,
Sumatera Barat, [1930]
Sumber: ANRI, KIT Sumbar 846/35

Masjid 1001 malam di Fort de Kock,
Sumatera Barat [1930]
Sumber: ANRI, KIT 805/64

Khotbah Idul Fitri yang diikuti beribu-ribu jama'ah di lapangan Kantin Bukittinggi, 5 Juli 1951.
Sumber: ANRI, Kempen 514971

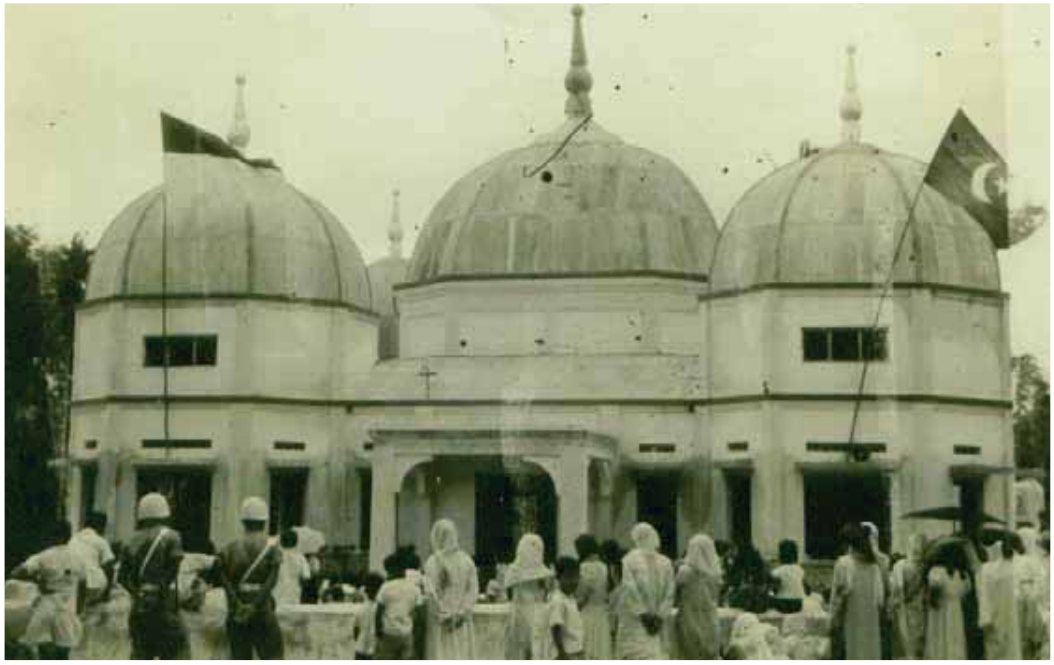

Masjid di Bukittinggi saat dikunjungi Wapres RI Moh. Hatta, 7 April 1954.

Sumber: ANRI, Kempen 540407 CC 1 – 24

Al Qur'an tua di Bukittinggi,
5 Desember 1955.
Sumber: ANRI, Kempen Sumbar 551205 CC 1 3

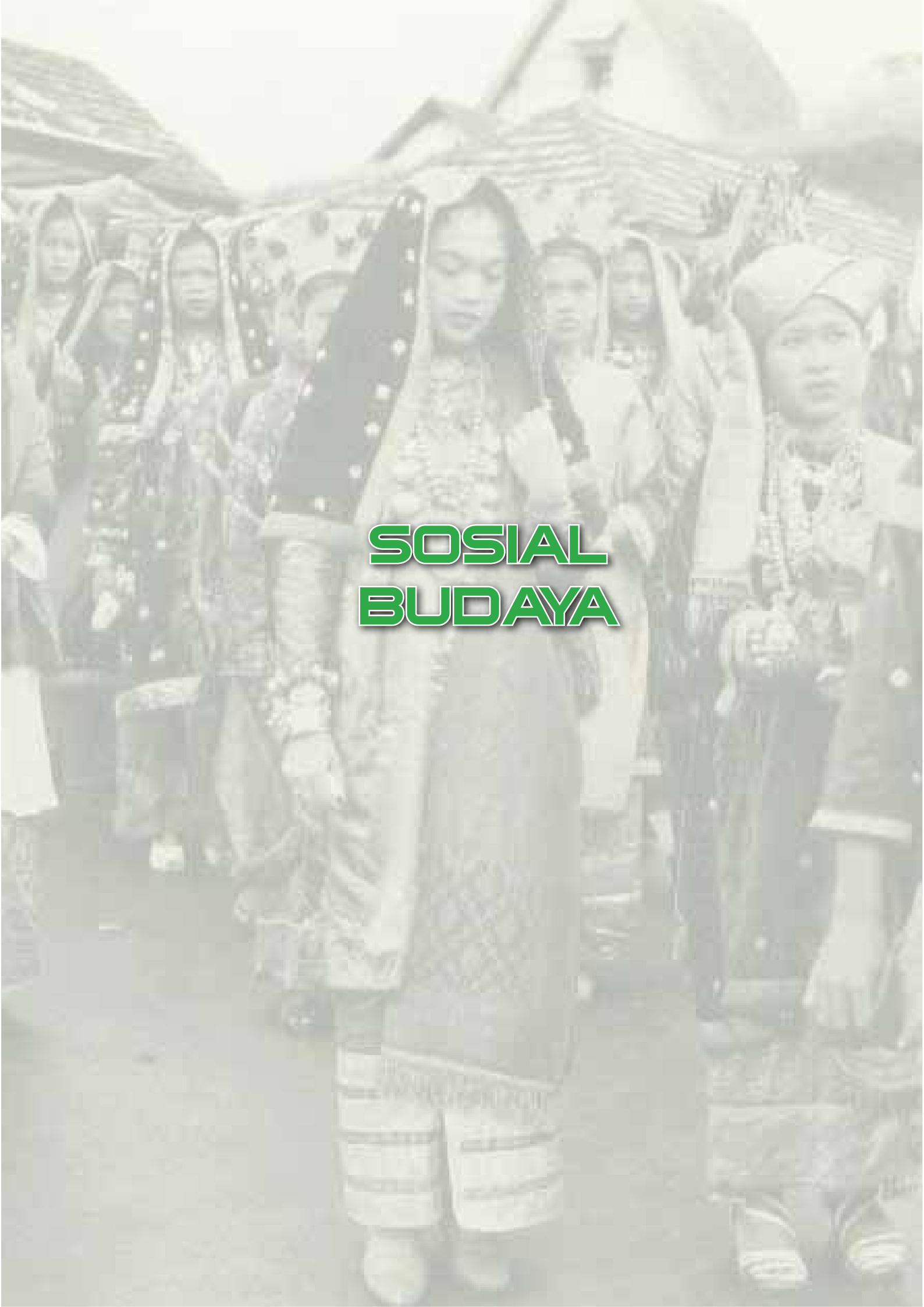

SOSIAL BUDAYA

Budaya Minang sebagai adat yang sangat dijunjung dalam kehidupan keseharian masyarakat Bukittinggi. Kesenian rakyat seperti pertunjukan musik rebana atau mengenakan pakaian lengkap adat Minangkabau sering ditampilkan secara resmi dalam penyambutan tamu istimewa Pemerintahan nya.

Masyarakat kota yang menjadi heterogen, untuk tradisi adat tetap menjalankan penerapan pemerintahan **nagari**. Kebudayaan masyarakat sudah berinteraksi dengan budaya lain, seperti yang terekam dalam khasanah arsip.

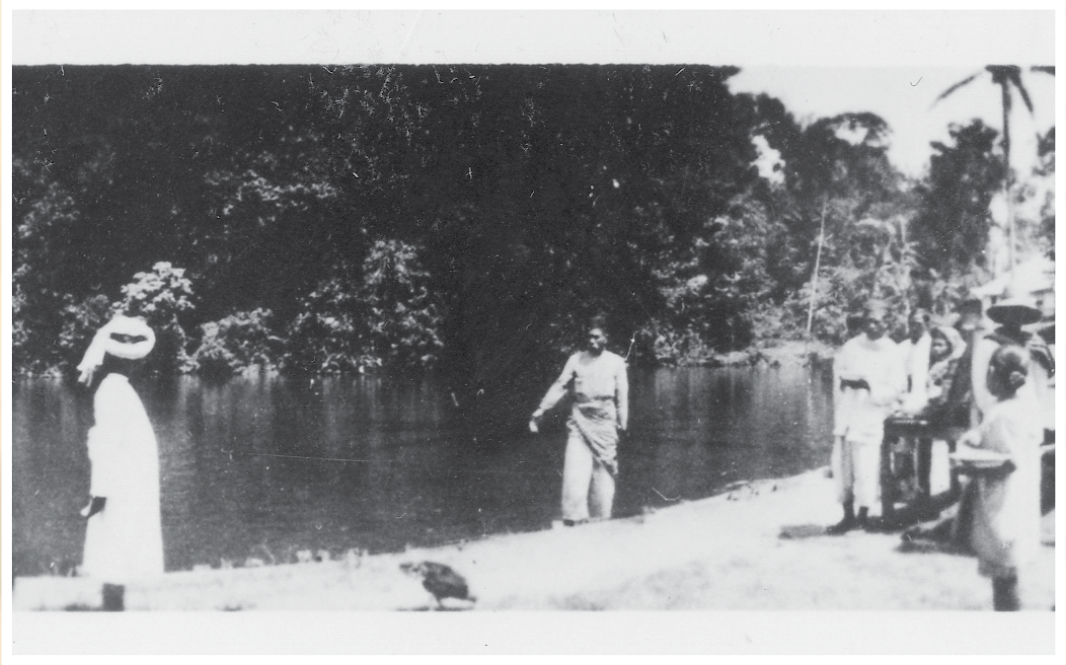

Kolam suci/keramat di Fort de Kock, Bukittinggi, Sumatera Barat, [1930].
Sumber: ANRI, KIT Sumbar 955/33

Pernikahan dengan Adat Bukittinggi, Sumatera Barat,
26 Agustus 1950.
Sumber: ANRI, Kempen 50667

Kesenian Rakyat berupa pertunjukan musik rebana,
di Bukittinggi, 22 Maret 1953.
Sumber: ANRI, Kempen 530322 CC 19

Gadis-gadis mengenakan pakaian adat Minangkabau ketika menyambut Wapres RI Moh. Hatta di Bukittinggi, 4 April 1954.
Sumber: ANRI, Kempen 540404 CC 17 dan 18,

Para wanita berpakaian adat yang mempertunjukkan tari piring di Bukittinggi, 1955.
Sumber: ANRI, Kempen Sumbar 550503 CC 22

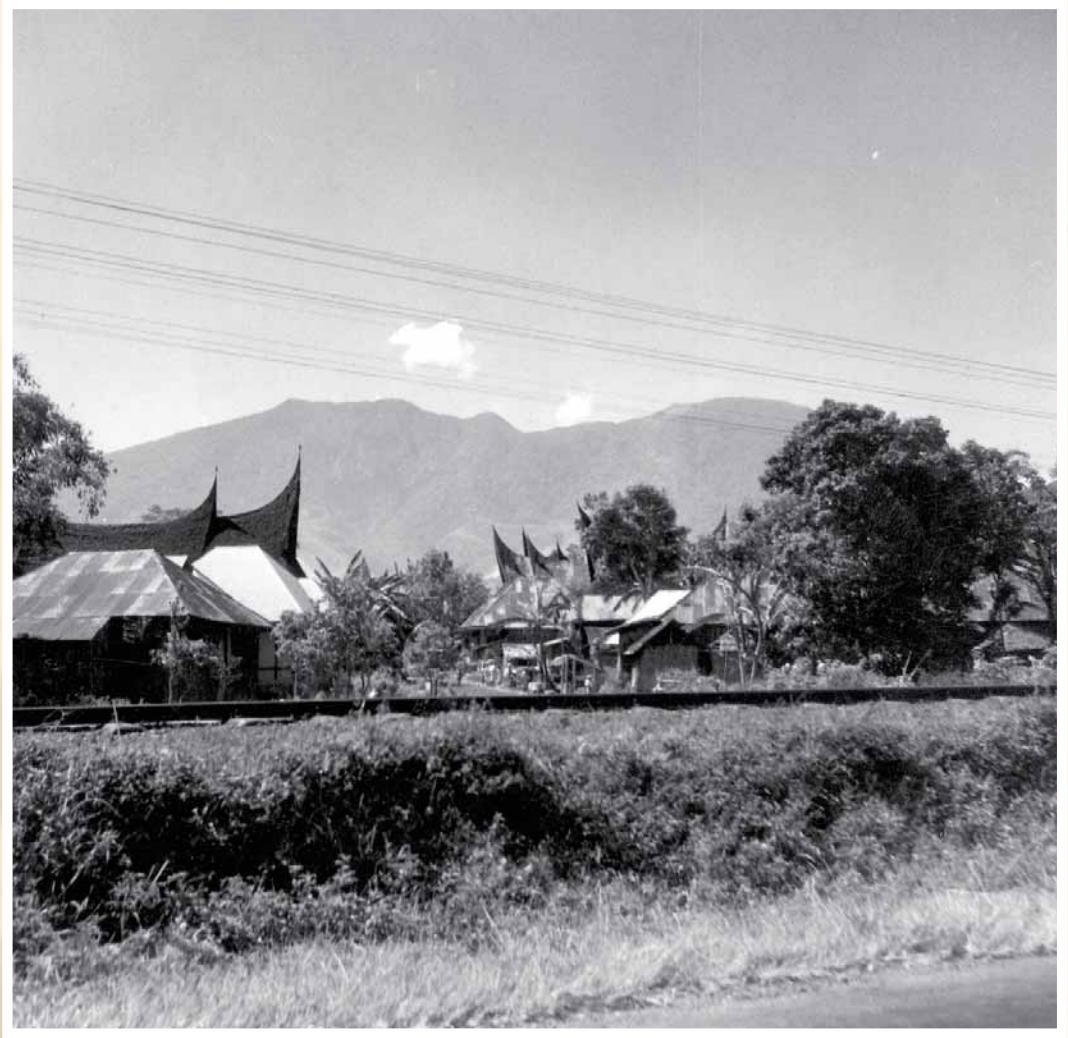

Kemandangan di sekitar salah satu desa dengan rumah-rumah adatnya di Bukittinggi, 1955.
Sumber: ANRI, Kempen Sumbar 550519 cc1

Gubernur Roeslan Muljohardjo sedang menerima kunjungan Komisi Kebudayaan Mesir Dr Husein Fahmy, 1956.
Sumber: ANRI, Kempen Sumbar 560803 CC 2

Ketua Komisi Kebudayaan Mesir Dr. Husein Fahmy sedang beramah tamah dengan Gubernur Roeslan Muljohardjo, 1956.
Sumber: ANRI, Kempen Sumbar 560803 cc 3

Rumah Gadang B.A Andjuang Bukittinggi, 1958.
Sumber: ANRI, Kempen Sumbar 580526 CC 3-1

DAFTAR ARSIP

A. GEOGRAFIS

1. Foto udara belahan ngarai, disebut celah kerbauwen di Fort deKock, Sumatera Barat, [1930]
   Sumber: ANRI, KIT Sumbar 755/77
2. Pemandangan sawah-sawah di Lubuk Sikaping, Fort de Kock, Sumatera Barat, [1930].
   Sumber: ANRI, KIT Sumbar 936/85
3. Belahan ngarai celah kerbauwen di Fort de Kock, Sumatera Barat, [1930].
   Sumber: ANRI, KIT Sumbar 936/79
4. Pemandangan lembah atau ngarai di Fort de Kock, Sumatera Barat, 1931.
   Sumber: ANRI, KIT Sumbar 935/41
5. Peta Fort de Kock, 1943.
   Sumber: ANRI, Kartografi Indonesia Sheet 17-18 XIX-XX
6. Peta Fort de Kock , 1945.
   Sumber: ANRI, Kartografi Indonesia No.2012
7. Peta Fort de Kock, 1946.
   Sumber: ANRI, Kartografi Indonesia Sheet XXX

B. POLITIK DAN PEMERINTAHAN

8. Surat Keputusan Gubernur Jenderal Hindia Belanda No. 37 Tahun 1861 tentang pembelian tanah datar di bagian selatan Fort de Kock seharga f 46.092 yang akan digunakan sebagai perkampungan militer, 5 Mei 1861.
   Sumber: ANRI, Bt 5 Mei 1861 N0. 37
9. Kunjungan Gubernur Jenderal ke Benteng Fort de Kock, Sumatera Barat, [1930].
   Sumber: ANRI, KIT Sumbar 324/32
10. Rumah Kontrolir, Knator Pos di Fort de Kock, Sumatera Barat, [1930].
    Sumber: ANRI, KIT Sumbar 826/81

11. Rumah Residen di Fort de Kock, Sumatera Barat, [1930].
    Sumber: ANRI, KIT Sumbar 176/50
12. Afdeeling Agam di Karesidenan Sumatra's Westkust dengan Ibu Kota Fort De Kock menurut staatsblad 1935 No. 450
    Sumber: ANRI, Regeerings Almanak 1939
13. Telegram dari Mayor Jenderal Soehardjo di Fort de Kock tentang berita jatuhnya kapal terbang Belanda di Pakan Baru, 4 Juli 1946.
    Sumber: ANRI, Algemeene Secretarie Ag No. 10977/1946
14. Fragmen (halaman awal) Rancangan Undang-Undang Pembentukan Provinsi Sumatera Tengah, 8 November 1948.
    Sumber: ANRI, Sekretaris Negara No. 177
15. Fragmen Laporan Bereau Indonesia bagian Penerangan Jakarta tentang pembagian daerah dalam Propinsi Sumatera/Kantor Gubernur Sumatera Bukittinggi, Kabupaten, Kawedanaan, Kecamatan dan nama-nama Bupati/Wedana/Camat, 1948.
    Sumber: ANRI, Djogja Documenten No. 260
16. Surat dari Dewan Partai-Partai Sosialis Indonesia kepada Dewan Daerah Besar Partai Sosialis Indonesia Bukit Tinggi tentang berbagai macam persiapan menghadapi perang melawan Belanda serta kemungkinan yang terjadi, 16 Desember 1948.
    Sumber: ANRI, Djogja Documenten No. 94
17. Turunan Surat dari Residen diperbantukan Gubernur Sumatera Tengah, Hamdani kepada Dewan Menteri RI di Jogyakarta tentang penundaaan keberangkatannya dan keluarga dari Sumatera Barat ke Jogyakarta, 30 Agustus 1949.
    Sumber: ANRI, Delegasi Indonesia No. 1068
18. Salinan Nota Gubernur Militer Sumatera Tengah Mr. St. Mohd Rasjid tentang pengembalian daerah Sumatera Barat menurut Perjanjian Renville, 28 Oktober 1949.
    Sumber: ANRI, Delegasi Indonesia No. 958
19. Telegram dari Sekretariat Delegasi Indonesia Jakarta kepada Local Joint Committee Bukittinggi tentang sidang pleno Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) di Jogyakarta, 25 Nopember 1949.
    Sumber: ANRI, Delegasi Indonesia No. 1129

20. Semboyan yang ditulis di Tugu Kemerdekaan di Bukittinggi, 26 Agustus 1950.
Sumber: ANRI, Kempen 50661

21. Salinan Laporan Kepala Jawatan Penerangan Kota Bukittinggi kepada Kepala Jawatan Penerangan Sumatera Tengah dan Acting Walikota Bukittinggi tentang hasil rapat 31 Maret 1952 membicarakan tanah Padang Puhun Mandiangin yang telah diserahkan kepada Pemerintah Kota Bukittinggi guna pembangunan kota Bukittinggi, 3 April 1952.
Sumber: ANRI, Kabinet Presiden No. 847

22. Wakil Presiden Moh. Hatta sedang menyaksikan pameran TRI Divisi IX di Bukittinggi, 1954.
Sumber: ANRI, Kempen 80706 CC 135

23. Halaman awal dan akhir Undang-Undang No. 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah, 19 Maret 1956.
Sumber: ANRI, Sekkab UU No. 185

24. Mohammad Hatta, lahir di Bukittinggi, 12 Agustus 1902 mantan Wakil Presiden Republik Indonesia dan Bapak Koperasi Indonesia, 19 September 1953.
Sumber: ANRI, Kempen 530919 FG 2-10

25. Haji Agus Salim, lahir di Bukittinggi, 8 Oktober 1884, Pemimpin Serikat Islam dan mantan Menteri Muda Luar Negeri pada Kabinet Syahrir II, 24 Maret 1964.
Sumber: ANRI, Kempen 64-2645

C. PENDIDIKAN

26. Pragmen Surat Keputusan Gubernur Jenderal No 13 Tahun 1856 tentang pendirian Sekolah Guru “Kweekschool” bagi kaum Bumi Putra di Fort de Kock (Padangshe Bovenlanden sekarang Bukit Tinggi), 1 April 1856.
Sumber: ANRI, Besluit 1 April 1856 No. 13n

27. Salinan Surat Walikota Fort de Kock kepada Direktur Binnenlansch Bestuur tentang Penghitungan penyerahan anggaran pendidikan dan kesehatan penduduk di luar daerah kepada kotapraja, 30 Desember 1938.
Sumber: ANRI, Binnenlandsch Bestuur No. 1523

28. Para siswa Sekolah Guru dan Hakim Agama bagian C di Bukittinggi sedang bermain tenis meja di ruang senam, 14 November 1952.
Sumber: ANRI, Kempen 521114 CC 3

29. Para siswa sedang membaca di Perpustakaan Sekolah Guru dan Hakim Agama bagian C di Bukittinggi, 14 November 1952.
Sumber: ANRI, Kempen 521114 CC 5

30. Keputusan Pengurus Besar Ikatan Pemuda Pelajar Indonesia (PB I.P.P.I) no. 2/S.S./54 tentang Perguruan SMP/SMA Kader Ikatan Pemuda Pelajar Indonesia Bukittinggi mengenai ditetapkan sdr. Juler A.M. sebagai Direktur SMP Kader Ikatan Pemuda Pelajar Indonesia, 17 Februari 1954.
Sumber: ANRI, I.P.P.I No. 255

D. PEREKONOMIAN

31. Toko Agam dan pertokoan di Lubuk Agam, Fort de Kock, Sumatera Barat, [1930].
Sumber: ANRI, KIT Sumbar 1098/4

32. Tambak ikan keramat didepan rumah di Kampung Teluk, Fort de Kock, Sumatera Barat, [1930].
Sumber: ANRI, KIT Sumbar 140/47

33. Gerobak-gerobak pedati di depan pasar, Fort de Kock, Sumatera Barat, [1930].
Sumber: ANRI, KIT Sumbar 364-32

34. Keramaian pasar Fort de Kock, Sumatera Barat, [1930].
Sumber: ANRI, KIT Sumbar 364-48

35. Buruh sedang menguliti pohon cassia di Fort de Kock, Sumatera Barat, [1930]
Sumber: ANRI, KIT Sumbar 621-24

36. Kerbau dan pemiliknya di Fort de Kock, Sumatera Barat,[1930]
Sumber: ANRI, KIT Sumbar 674-2

37. Pengangkutan sayur dengan menggunakan gerobak disekitar Pasar Bukit Tinggi, 21 April 1953.
Sumber: ANRI, Kempen 530421 CC 2 -10ere

38. Penjual Sate dan para pengemudi bendi (delman) disekitar Pasar Bukit Tinggi, 21 April 1953.
Sumber: ANRI, Kempen 530421 CC 2-6

39. Wakil Presiden Moh. Hatta mengunjungi perkampungan Bukittinggi, 1954.
Sumber: ANRI, Kempen K80706 CC100

40. Pemandangan di dekat Pasar dengan orang-orang pergi berbelanja, 1955.
Sumber: ANRI, Kempen Sumbar 551204 CC 6

41. Surat Keputusan Perdana Menteri RI (Kabinet Perdana Menteri Juanda) No. 668.57/Keu. OT tentang persetujuan pemberiankredit kepada Pembangunan Masyarakat Desa Propinsi Sumatera Tengah di Bukit Tinggi, 24 Oktober 1957.
Sumber: ANRI, Perdana Menteri Republik Indonesia No. 533

E. TRANSPORTASI

42. Delman sebagai alat transportasi di Fort de Kock, 1930.
Sumber: ANRI, KIT Sumbar 175-88

43. Delman-delman di “Pasar Minggu” menunggu penumpang , Fort de Kock, Sumatera Barat, [1930].
Sumber: ANRI, KIT Sumbar 697-38

44. Autobus sebagai alat transportasi di Fort de Kock, Sumatera Barat, 1930.
Sumber: ANRI, KIT Sumbar 698-8

F. INFRASTRUKTUR

45. Sketsa bangunan loji untuk melayani pegawai-pegawai dan gudang penyimpanan rumah sakit (bangsal wanita) di Fort de Kock, 1863.
Sumber: ANRI, HB 1764 No.10

46. Fragmen Surat Keputusan Gubernur Jenderal tentang permohonan peralatan dari Eropa bagi perluasan jalur kereta Fort de Kock Bukittinggi, 17 Juli 1845.
Sumber: ANRI, Besluit 17 Juli 1895 No.6

47. Jalan di perumahan, Fort de Kock, Sumatera Barat, [1921].
Sumber: ANRI, KIT Sumbar 1098-6

48. Salah satu sudut kota di Fort de Kock, Sumatera Barat, [1930]
Sumber: ANRI, KIT Sumbar 754-73

49. Panorama daerah tempat peristirahatan di Fort de Kock, Sumatera Barat, [1930]
Sumber: ANRI, KIT Sumbar 168-26

50. Kampung do Fort de Kock, Sumatera Barat, [1930].
Sumber: ANRI, KIT Sumbar 175-86.

51. Jembatan di celah kerbauwen Fort de Kock, Sumatera Barat, [1930].
Sumber: ANRI, KIT Sumbar 180-64

52. Panorama di areal Bentenf Fort de Kock, Sumatera Barat, [1930]
Sumber: ANRI, KIT Sumbar 255-70

53. Jalan raya di Fort de Kock dengan latar belakang Gunung Merapi, Sumatera Barat, [1930]
Sumber: ANRI, KIT Sumbar 52-80

54. Desa di celah Kerbauwen di Fort de Kock, Sumatera Barat, [1930].
Sumber: ANRI, KIT Sumbar 52-84

55. Kampung Taluk di Fort de Kock, Sumatera Barat, [1930].
Sumber: ANRI, KIT Sumbar 76-54

56. Rumah Direktur Kweekschool di Fort de Kock, Sumatera Barat, [1930]
Sumber: ANRI, KIT Sumbar 825-51

57. Komplek perumahan tentara di Fort de Kock, Sumatera Barat, [1930]
Sumber: ANRI, KIT Sumbar 827-49

58. Komplek perumahan tentara di Fort de Kock, Sumatera Barat, [1930]
Sumber: ANRI, KIT Sumbar 827-51

59. Rumah di Fort de Kock, Sumatera Barat, [1930]
Sumber: ANRI, KIT Sumbar 845-1

60. Kampung di Fort de Kock di latar belakang kantor pos, Sumatera Barat, [1930]
Sumber: ANRI, KIT Sumbar 846-69

61. Balai pertemuan di Fort de Kock, Sumatera Barat, [1930].
Sumber: ANRI, KIT 176-60

62. Rumah tua bergaya minang dekat Fort de Kock, Kampung Baso, Sumatera Barat, [1930]
Sumber: ANRI, KIT Sumbar 257-60

63. Balai Pertemuan di Fort de Kock, Sumatera Barat, 1930.
Sumber: ANRI, KIT Sumbar 257-82

64. Jam Gadang di Fort de Kock dengan latar belakang Kantor Pos, Sumatera Barat, [1930].
Sumber: ANRI, KIT Sumbar 754-76

65. Menara monumen masuk pasar, Fort de Kock, Sumatera Barat, [1930].
Sumber: ANRI, KIT Sumbar 755-79

66. Jam di tengah kota Fort de Kock, Sumatera Barat, [1930].
Sumber: ANRI, KIT Sumbar 760-87

67. Tugu Katulistiwa di Fort de Kock, Sumatera Barat, [1930]
Sumber: ANRI, KIT Sumbar 789-77

68. Rumah adat di Fort de Kock, Sumatera Barat, [1930].
Sumber: ANRI, KIT Sumbar 846-11

69. Rumah adat dengan dinding berhias di Fort de Kock, Sumatera Barat, [1930].
Sumber: ANRI, KIT Sumbar 846-12

70. Rumah adat di Fort de Kock, Sumatera Barat, [1930].
Sumber: ANRI, KIT Sumbar 846-9

71. Museum Kebudayaan di Fort de Kock , [1940].
Sumber: ANRI, KIT 1101/046

72. Bekas rumah Residen di Fort de Kock, Sumatera Barat, [1940].
Sumber: ANRI, KIT 0775/071

73. Jam Gadang di Bukittinggi, 21 April 1953.
Sumber: ANRI, Kempen K 530421 CC 2-2

74. Tugu Kemerdekaan Republik Indonesia di Bukittinggi, 27 April 1953.
Sumber: ANRI, Kempen K 530427 CC 1-1

75. Kantor Polisi Negara Pos Rao, Bukittinggi, 7 April 1954.
Sumber: ANRI, Kempen 540407 CC 4-1

76. Tugu Peringatan Kemerdekaan 17 Agustus di Taman Panorama Bukittinggi. Di belakang nampak Gunung Singgalang, 1955.
Sumber: ANRI, Kempen Sumbar 550915 cc 1-2

G. KEAGAMAAN

77. Masjid di Sungai Taluk, Fort de Kock, Sumatera Barat, 1918.
Sumber: ANRI, KIT 168/30

78. Menara Masjid Tahok di depan kolam, Fort de Kock, Sumatera Barat, [1930].
Sumber: ANRI, KIT Sumbar 1098/8

79. Masjid Raya di Fort de Kock, Sumatera Barat, [1930]
Sumber: ANRI, KIT Sumbar 52/82, KIT Sumbar 75/82

80. Masjid tua dan lumbung padi di Fort de Kock, Sumatera Barat, [1930].
Sumber: ANRI, KIT Sumbar 563/72

81. Masjid berbentuk bangunan adat di Fort de Kock, Sumatera Barat, [1930]
Sumber: ANRI, KIT SUmbar 75/84

82. Surau dari abad 18 di Baso, Fort de Kock, Sumatera Barat, [1930]
Sumber: ANRI, KIT Sumbar 804/6

83. Masjid dan kampung di Fort de Kock, Sumatera Barat, [1930]
Sumber: ANRI, KIT Sumbar 846/35

84. Masjid 1001 malam di Fort de Kock, Sumatera Barat [1930]
Sumber: ANRI, KIT 805/64

85. Khotbah Idul Fitri yang diikuti beribu-ribu jama'ah di lapangan Kantin Bukittinggi, 5 Juli 1951.
Sumber: ANRI, Kempen 514971

86. Masjid di Bukittinggi saat dikunjungi Wapres RI Moh. Hatta, 7 April 1954.
Sumber: ANRI, Kempen 540407 CC 1 – 24

87. Al Qur'an tua di Bukittinggi, 5 Desember 1955.
Sumber: ANRI, Kempen Sumbar 551205 CC 1 3

H. SOSIAL DAN BUDAYA

88. Kolam suci/keramat di Fort de Kock, Bukittinggi, Sumatera Barat, [1930].
Sumber: ANRI, KIT Sumbar 955/33

89. Pernikahan dengan Adat Bukittinggi, Sumatera Barat, 26 Agustus 1950.
Sumber: ANRI, Kempen 50667

90. Kesenian Rakyat berupa pertunjukan musik rebana, di Bukittinggi, 22 Maret 1953.
Sumber: ANRI, Kempen 530322 CC 19

91. Gadis-gadis mengenakan pakaian adat Minangkabau ketika menyambut Wapres RI Moh. Hatta di Bukit Tinggi, 4 April 1954.
Sumber: ANRI, Kempen 540404 CC 17 dan 18

92. Para wanita berpakaian adat yang mempertunjukkan tari piring di Bukittinggi, 1955.
Sumber: ANRI, Kempen Sumbar 550503 CC 22

93. Kemandangan di sekitar salah satu desa dengan rumah-rumah adatnya di Bukittinggi, 1955.
Sumber: ANRI, Kempen Sumbar 550519 cc1

94. Gubernur Roeslan Muljohardjo sedang menerima kunjungan Komisi Kebudayaan Mesir Dr Husein Fahmy, 1956.
Sumber: ANRI, Kempen Sumbar 560803 CC 2

95. Ketua Komisi Kebudayaan Mesir Dr. Husein Fahmy sedang beramah tamah dengan Gubernur Roeslan Muljohardjo, 1956.
Sumber: ANRI, Kempen Sumbar 560803 cc 3

96. Rumah Gadang B.A Andjuang Bukittinggi, 1958.
Sumber: ANRI, Kempen Sumbar 580526 CC 3-1

PENUTUP

PENUTUP

Program Citra Daerah yang dikembangkan ANRI merupakan salah satu upaya memberdayakan daerah melalui arsip. Hal ini sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yakni meningkatkan peran daerah di berbagai bidang, termasuk bidang kearsipan.

Arsip sebagai salah satu sumber informasi yang terpercaya dapat menunjukkan keberhasilan maupun kegagalan yang dialami pada masa lalu untuk diaplikasikan secara adaptif dan kontekstual dalam merencanakan pembangunan di daerah yang semakin kompleks.

"Citra Kota Bukittinggi Dalam Arsip" diharapkan dapat ditindaklanjuti oleh Pemerintah Kota Bukittinggi dengan menyebarluaskannya kepada masyarakat umum, khususnya generasi muda.

Penyebarluasan ini sangat penting artinya karena dapat memberikan dorongan kepada masyarakat luas untuk mempelajari dan menggali lebih dalam lagi informasi mengenai penyelenggaraan kehidupan kebangsaan dalam lingkup daerah. Pada gilirannya arsip dapat menjadi memori kolektif daerah yang berfungsi sebagai pemberi semangat dalam menumbuhkan rasa kebanggaan sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia

Arsip Nasional Republik Indonesia
Jl. Ampera Raya No. 7, Cilandak Timur,
Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12560
Telp. 62-21-7805851, Fax.62-21-7810280, 7805812
http//www.anri.go.id, e-mail: info@anri.go.id